



UNIVERSITAS INDONESIA

**KUASA dan RUANG DEMOKRASI
(STUDI KASUS:PEMAGARAN MONUMEN NASIONAL)**

***POWER and DEMOCRATIC SPACE
(CASE STUDY:FRAMING MONUMEN NASIONAL)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur

**FRESTIANA MANURUNG
0404050246**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
KEKHUSUSAN ARSITEKTUR
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Frestiana Manurung

NPM : 0404050246

Tanda Tangan :

Tanggal :17 Juli 2009

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Frestiana Manurung
NPM : 0404050246
Program Studi : Arsitektur
Judul Skripsi : Kuasa dan Ruang Demokrasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kemas Ridwan Kurniawan, ST, MSc.Ph.D ()
Penguji : Dr. Ir.Emirhadi Suganda, M. Sc. ()
Penguji : Dr. Ir. Laksmi Gondokusumo Siregar, M. Si ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Juli 2009

Universitas Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Arsitektur.

Saya mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan penulisan laporan ini tanpa bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan saya selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. *Faa bi ayyi aalaa- i rabbikumaa tukadzdzibaan.* Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan (Ar Rahman13) .
2. Bapak Kemas Ridwan Kurniawan,ST, MSc. Ph. D selaku pembimbing skripsi yang telah memberi masukan-masukan yang sangat berharga.
3. Ir. Hendrajaya Isnaeni, M. Arch, PhD, selaku dosen koordinator skripsi.
4. Bapak Kuncoro Sukardi, selaku dosen pembimbng akademis selama 4,5 tahun. Terima kasih atas semua bimbingan dan motivasinya.
5. Mama, maaf tidak bisa memberi yang terbaik.
6. Ka, calon psikolog yang sarkas. Terima kasih atas waktu-waktu panjang obrolan kita.
7. Embah, Dafi kecil, terimakasih atas semangatnya.

Universitas Indonesia

8. Mahardiyanti Kusumaningtyas, atas bantuan surveynya dan bantuan yang lain
9. Teman-teman 2004 Ayu, Tami, Zege, Masyi, Icha terimakasih atas dukungan yang luar biasa.
10. Teman-teman mentoring 2004, Mba Sita, Likur, Rangi, Karin, terima kasih, bantuan kalian akan selalu saya ingat. *Insyallah* bermanfaat.
11. Adik-adik mentoring 2007, Wulan, Tuti, Medina, Metha, Dita, Puspa, Rizka, Reni, terima kasih atas semangat yang menular.
12. Adik-adik mentoring 2008, Azka, Ajeng, Nunu, Mega, Sofi, Inka, Dewi, Siki, Ibil, Dona, terima kasih atas suasana mentoring yang lucu.
13. Komunitas Timah, akhirnya, kelompok kita tidak ada yang tertinggal di kampus.
14. Adik-adik 2007, Galuh, Mia, Siwi, selamat berjuang!
15. Ayu, Karin, teman magang yang baik. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat.
16. Nita, Yudis, terima kasih mau duduk bersama, dan berdiskusi. Akhirnya, kita selesai Nit.

Saya mohon maaf apabila di dalam proses penyusunan skripsi ini, masih banyak terdapat kesalahan. Semoga skripsi yang saya buat ini dapat bermanfaat.

Depok, 17 Juli 2009

Frestiana Manurung

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frestiana Manurung
NPM : 0404050246
Program Studi : Arsitektur
Departemen : Arsitektur
Fakultas : Teknik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty-Free Fight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kuasa dan Ruang Demokrasi

Studi Kasus: Pemagaran Monumen Nasional

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan

(FRESTIANA MANURUNG)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Frestiana Manurung
Program Studi : Arsitektur
Judul : Kuasa dan Ruang Demokrasi
Studi Kasus: Pemagaran Monumen Nasional

Melalui SK Gubernur No. 36/2002, Pemerintah DKI Jakarta melakukan pemagaran terhadap Monumen Nasional, sebuah ruang publik yang salah satu fungsinya adalah sebagai ruang demokrasi. Skripsi ini akan mengungkap fenomena pemagaran Monumen Nasional sebagai sebuah representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi. Metode analisa yang digunakan dalam pembahasan pemagaran Monas ini, lebih melihat kepada hubungan antara representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi, serta pemaparan sejarah kuasa dan representasinya di Jakarta, untuk menunjukkan hadirnya kuasa dalam ruang publik sebagai ruang demokrasi dan mengetahui latar belakang pemagaran Monumen Nasional.

Hipotesis dari skripsi ini adalah bahwa kuasa hadir dalam ruang demokrasi dengan berbagai bentuk. Pemagaran Monas merupakan salah satu bentuk representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi.

Kata kunci:
Representasi kuasa, ruang publik, ruang demokrasi

ABSTRACT

Name : Frestiana Manurung
Study Program: Architecture
Title : Power and Democratic Space
Case Study:Framing Monumen Nasional

Using SK Gubernur No.36/2002, the government of DKI Jakarta framing Monumen Nasional, a public space that have a function as a democratic space. This thesis will pronounce the phenomenon of framing Monumen Nasional as a representation of power in a public space , especially democratic space. The method of analysis which used in the discussion of framing Monumen Nasional is by seeing relation of representation of power in a public space, especially democratic space, also explained about the history of power and the representation of power in Jakarta, for showing the power in a public space as democratic space and know the reason of framing Monumen Nasional

The hipotesis of this thesis is framing Monas is a form of representation of power ini a public space, especially democratic space.

Key words:

Representation of power, public sace, democratic space

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Metodologi	3
1.6 Skema Pemikiran	4
1.7 Urutan Pembahasan	4
2. KUASA dan RUANG DEMOKRASI	6
2.1 Definisi dan Bentuk Kuasa	6
2.2 Bentuk- bentuk Kuasa	7
2.3 Representasi Kuasa dan Ruang	11
2.4 Ruang Publik Sebagai Ruang Demokrasi	12
2.5 Ruang-ruang Demokrasi dalam Sejarah	16
3. KUASA dan RUANG PUBLIK di INDONESIA MASA KOLONIAL dan PASCA KOLONIAL	27
3.1. Belanda Sistem Rasila Dalam Ruang Publik	27
3.2. Soekarno, Kuasa dan Jalan Sebagai Media Revolusi	29
3.2.1 Soekarno dan Kuasa	29
3.2.2 Soekarno, Jalanan Ibu Kota, dan Revolusi	33
3.3 Soeharto, Kuasa, dan Politik Jalan	35
3.3.1 Soeharto dan Kuasa	36
3.3.2 Soeharto dan Politik Jalan Orde Baru	36
4. PAGAR dan MONUMEN NASIONAL	44
4.1 Pagar	44
4.2 Pemagaran Monas Sebagai Studi Kasus	50
4.3 Monas Sepanjang Sejarah	50
4.4 Kebijakan Soetiyoso terhadap Ruang Publik di Jakarta	53

Universitas Indonesia

4.5 Latar Belakang Pemagaran Monas	55
4.6 Master Plan Monas	60
4.7 Pagar dan Monas	62
5. KESIMPULAN	65
DAFTAR REFERENSI	66

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Salah satu pintu masuk Monas pasca pemagaran
- Gambar 2.1. Penjara, sebagai salah satu bentuk pemaksaan ruang
- Gambar 2.2. Parade pengawal kerajaan Inggris, salah satu bentuk dominasi/intimidasi
- Gambar 2.3. Res publica dan hubungannya dengan res privata
- Gambar 2.4. Kiva, sebuah ruang yang digunakan oleh suku Hopi (Indian untuk memilih kepala suku
- Gambar 2.5. Landsgemeinde, merupakan peristiwa pemilihan walikota secara langsung di Swiss
- Gambar 2.6. Sebuah forum square di Romawi
- Gambar 2.7. Basilica, yang digunakan sebagai ruang pengadilan
- Gambar 2.8. Colosseum tempat rakyat melakukan tradisi pertarungan gladiator
- Gambar 2.9. Tetrasyon, yang digunakan masyarakat Yunani untuk melakukan orasi
- Gambar 2.10. Kuil Bel di Palmyra, yang digunakan untuk penyembahan terhadap dewa
- Gambar 2.11. Bangunan dan struktur Agora pada abad ke-5 Sebelum Masehi
- Gambar 3.1. Soekarno, menggunakan ruang-ruang publik untuk menyampaikan gagasannya akan revolusi
- Gambar 3.2. Objek pidato Soekarno, dibutuhkan jalan untuk memobilisasi pergerakan mereka
- Gambar 3.3. Kerusuhan Malari
- Gambar 3.4. Jalan-jalan kota dipakai untuk berdemonstrasi
- Gambar 3.5. Pengerahan militer untuk memadamkan aksi
- Gambar 3.6. Penguasa yang dianggap bertanggungjawab
- Gambar 3.7. Baliho Soeharto yang dipasang di ruang publik untuk menunjukkan pengawasan
- Gambar 4.1. Masyarakat asli Amerika yang menggunakan pagar untuk melindungi diri mereka dari binatang buas
- Gambar 4.2. Penduduk asli Amerika menggunakan bentuk pagar seperti anak panah untuk menangkap rusa
- Gambar 4.3. Masyarakat asli Amerika menggunakan pagar sebagai benteng
- Gambar 4.4. Rumah adat dan pagar Bali
- Gambar 4.5. Soekarno menggunakan Taman Monas untuk melakukan orasi
- Gambar 4.6. Masyarakat dengan bebas mengakses Taman Monas
- Gambar 4.7. Masyarakat dengan bebas mengakses Taman Monas
- Gambar 4.8. Rencana induk Koningsplein tahun 1937 yang dikembangkan oleh Thomas Karsten
- Gambar 4.9. Salah satu aksi mahasiswa yang dilakukan di gedung DPR/MPR
- Gambar 4.10. Menjemur sarung di lapangan Monas di awal pasca –Soeharto

Universitas Indonesia

- Gambar 4.11. Pagar yang mengelilingi Monas
- Gambar 4.12. Pagar di sekeliling Monas
- Gambar 4.13. Pintu Monas yang direncanakan akan didirikan monument peringatan.
- Gambar 4.14. Pedagang kaki lima yang masih beruntung diberi kesempatan berdagang pasca pemagaran Monas
- Gambar 4.15. Patroli keliling
- Gambar 4.16. Aksi menyuarakan politik di Monas
- Gambar 4.17. Monas sebelum dipagar, memiliki akses dari berbagai arah
- Gambar 4.18. Taman Monas yang telah dipagar
- Gambar 4.19. Pola akses ke dalam Monas
- Gambar 4.20. Patroli keamanan Monas
- Gambar 4.21. Pagar Monas
- Gambar 4.22. Area publik-privat Taman Monas, ditinjau dari budaya pagar
- Gambar 4.23. Pintu masuk Monas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan SK Gubernur No.36/2002, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar 9 miliar rupiah untuk proyek pemagaran Taman Monas. Proyek yang digagas oleh Soetiyoso selaku Gubernur pada saat itu, dilakukan untuk mencegah pedagang kaki lima dan preman memasuki kawasan Taman Monas.¹ Pagar ini dibuat dari besi baja, dengan tinggi 2,75 meter. Selain itu, dibuat empat pintu masuk ke dalam Monas, dan setiap pintu dijaga oleh polisi pramong praja, pasukan berkuda dan bersepeda motor.



Gambar 1.1. Salah satu pintu masuk Monas pasca pemagaran

Sumber: dokumen pribadi

Dalam kehidupan sehari-hari, sering tanpa kita sadari, gerak-gerik dan tingkah laku kita dibatasi, atau bahkan diawasi. Pembatasan ini diwujudkan dalam bentuk yang bermacam-macam, misalnya perencanaan program ruang, pemasangan dinding, pemasangan pagar, dsb.

Sebuah kuasa dianggap dapat mempengaruhi bentuk bangunan dan tata kota. Kuasa ini hadir dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang secara terang-terangan menunjukkan kuasa tersebut, misalnya dengan mengadakan parade militer, namun

¹ Pemagaran Monas Dimulai Senin Depan. (12 Juli 2002). Tempo

ada juga yang disembunyikan dari orang lain namun bertujuan untuk menguasai orang lain. Kuasa ini dapat mempengaruhi perilaku orang lain (dalam kondisi sadar ataupun tidak) dalam sebuah ruang, mulai dari terbatasnya akses terhadap ruang, sampai bentuk isolasi dalam ruang, misalnya penjara. Fenomena taman kota yang dipagar, akses ke dalam ruang publik yang dipersulit, jam pemakaian ruang yang dikurangi, merupakan beberapa contoh kuasa yang hadir dalam ruang-ruang publik kota.

Arsitektur, sebagai elemen demokrasi, semestinya lahir dari prinsip *res publica* yang menjadikan arsitektur sebagai monument sekaligus ruang yang melahirkan spontanitas politik publik dan masing-masing orang dapat merasakan kekuatan kolektif mereka.²

Skripsi ini akan membahas lebih lanjut tentang pengaruh kuasa terhadap ruang publik dalam kota, khususnya ruang demokrasi.

1.2 Masalah

Terdapat suatu kaitan yang erat antara kuasa dan arsitektur serta tata ruang kota. Perilaku masyarakat dibentuk dalam sebuah ruang, akan tetapi apa jadinya jika ruang-ruang tersebut baik secara tersembunyi maupun terang-terangan ditumpangi maksud-maksud tertentu, dengan menggunakan sebuah kekuatan yang terorganisir.

Dengan berbagai macam dimensi, kuasa hadir dalam ruang – ruang publik. Kehadiran kuasa tersebut akan menjadi masalah ketika esensi dari ruang publik itu terganggu karena kuasa tersebut. Dimensi kuasa yang akhirnya dituangkan dalam

ruang publik, mungkin saja akan merugikan objek kuasa, yaitu penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang hadirnya kuasa dalam ruang publik, dimensi yang dipakai oleh kuasa tersebut, serta representasinya dalam ruang publik, sebagai ruang demokrasi.

² Charles Jencks. (1987, August). Democracy :The Ideology and Ideal of The West, Architectural Design, 7

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang hubungan antara representasi kuasa dalam berbagai bentuk dan dimensi, dengan ruang demokrasi. Bagaimana kuasa dapat melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap ruang publik dalam kota, dengan media arsitektur dan perancangan kota. Hal ini agar pembaca mengetahui bahwa kuasa dapat diwujudkan melalui media arsitektur dan ruang kota, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang-orang yang berada di dalamnya.

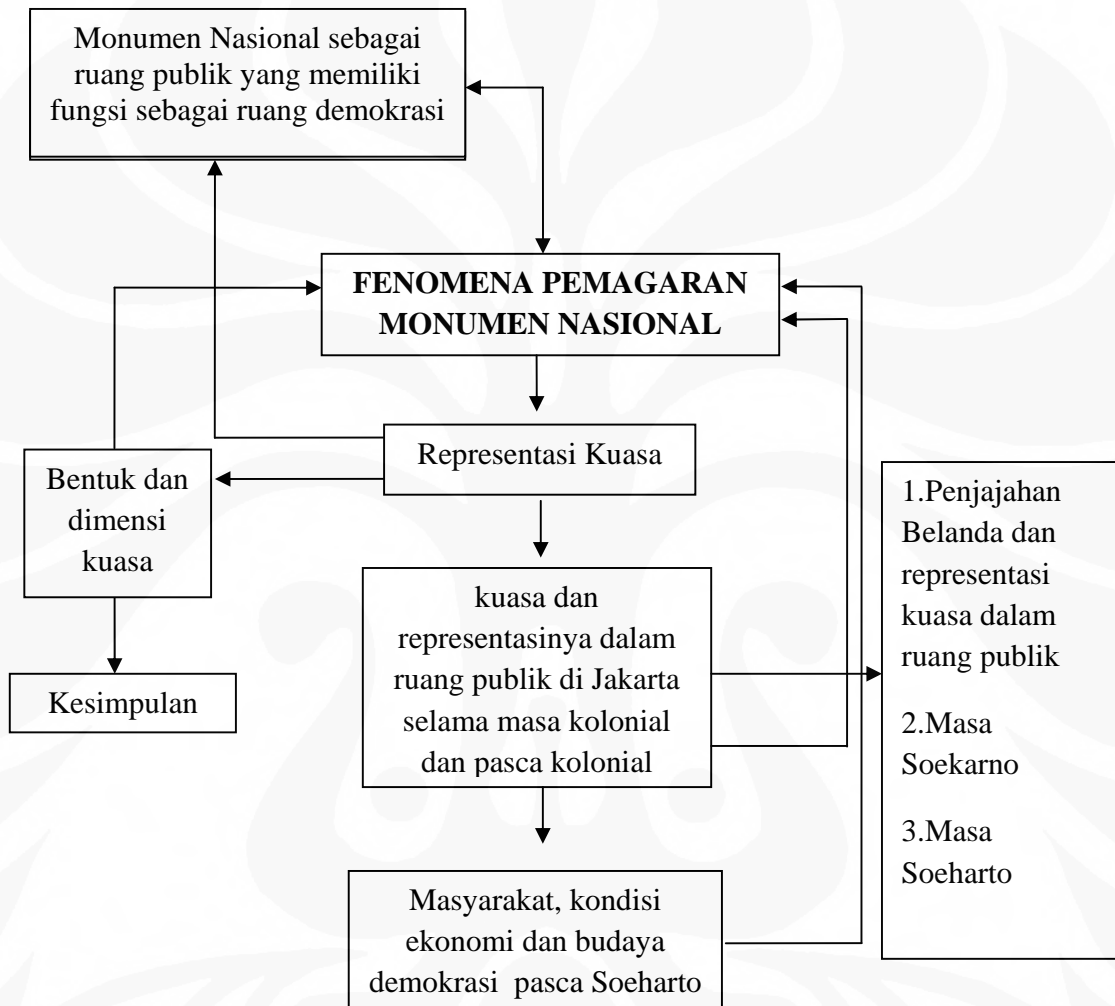
1.4 Ruang Lingkup

Tulisan ini berusaha untuk melihat gejala kuasa yang timbul dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi dalam kota. Dimensi apa saja yang dapat dipakai untuk mewujudkan kuasa, dan bagaimana representasi kuasa tersebut hadir dalam ruang kota? Masalah dikerucutkan ke dalam representasi kuasa dalam ruang publik.

1.5 Metodologi

Hubungan antara arsitektur, ruang publik dan politik (demokrasi) dengan studi kasus pemagaran Monas, dibuat dengan menggunakan studi literatur (buku dan media elektronik), survey lapangan, serta wawancara. Studi literatur digunakan untuk mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan teori yang berhubungan dengan tema, serta data-data teknis. Survey lapangan serta wawancara digunakan untuk melengkapi data teknis, serta dipakai sebagai bahan analisis.

1.6 Skema Pemikiran



1.7 Urutan Pembahasan

Rangkaian pembahasan skripsi ini dimulai dengan pengkajian mengenai kuasa, representasi kuasa, dilanjutkan dengan definisi ruang publik sebagai ruang demokrasi. Setelah itu dilanjutkan dengan perkembangan sejarah tentang representasi kuasa dalam ruang demokrasi melalui media arsitektur dan tata kota di Indonesia.

Universitas Indonesia

Sejarah ini dikemukakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara kondisi masa lalu dengan latar belakang pemagaran Monumen Nasional. Pembahasan tentang sejarah kuasa dan representasi kuasa di dalam ruang demokrasi di Jakarta, diurutkan sesuai dengan periode penguasa di Indonesia, disertai dengan gambaran representasi kuasa dalam ruang publik oleh masing-masing penguasa. Bagian akhir dari skripsi ini adalah studi kasus, yaitu tentang pemagaran Monas, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Skripsi ini berisi tentang analisis representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya dalam ruang demokrasi.

BAB 2

KUASA dan RUANG DEMOKRASI

Pembahasan tentang kuasa ini berhubungan dengan fenomena semakin banyaknya ruang-ruang publik yang dibatasi aksesnya oleh penguasa. Tanpa disadari, kuasa hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Kuasa hadir dalam berbagai dimensi dan representasi. Kehadirannya terlihat jelas dalam ruang-ruang publik, akan tetapi ada pula yang tersembunyi.

2.1 Definisi dan Bentuk Kuasa

Menurut *Oxford Learner Pocket Dictionary*, power dapat diartikan sebagai: *ability to do or act* (kemampuan untuk melakukan sesuatu), *particular ability of the body or mind* (kekuatan khusus dari tubuh dan pikiran), *strength* (kekuatan), *control over other* (mengontrol orang lain), *political control* (control politik), *legal right authority* (hak otoritas), *energy or force that can be use to do work* (energy atau kekuatan yang dapat digunakan untuk bekerja).

Istilah “*power*” berasal dari bahasa Latin *potere*, ‘*to be able*’, yang berarti kapasitas untuk mencapai tujuan akhir. Power, dalam kaitannya dengan hubungan manusia, berarti mengontrol orang lain. Dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian antara “*power to*” dan “*power over*”, yaitu *power* sebagai kapasitas dan *power* sebagai hubungan antar manusia.³ *Power* sebagai kapasitas dan *power* sebagai hubungan antar sesama manusia mempunyai hubungan yang bersifat parasit. Selanjutnya, istilah *power* yang akan digunakan mengacu pada pengertian power sebagai hubungan manusia (*power over*), yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kuasa.

Power / kuasa adalah kemampuan...untuk mendefinisikan dan mengontrol keadaan dan kejadian sehingga seseorang dapat mempengaruhi sesuatu untuk berjalan

³ Isaac (1992:2), dikutip oleh Kim Dovey, Framing Places Mediating Power in Built Form. Hlm. 9

sesuai dengan kemauan seseorang.⁴ *Power* adalah sesuatu yang bersifat positif dan negatif.⁵ *Power* yang bersifat positif, misalnya kekuatan yang membebaskan, sementara *power* yang bersifat negatif misalnya ketakutan, dan kekuatan untuk menekan.⁶

2.2 Bentuk-Bentuk Kuasa

Kuasa adalah sebuah kekuatan dari sebuah unsur atau kelompok untuk menguasai yang lain, dan sebuah kekuasaan akan menjamin pelaksanaannya. Menurut Kim Dovey, terdapat beberapa bentuk dari kuasa, yang mirip, akan tetapi berbeda, yaitu:

1. *Force*

Force adalah pelaksanaan kuasa secara terang-terangan dengan cara tidak memberikan pilihan kepada objek kuasa, dan terdapat unsur ketidakrelaan dari objek. Bentuk bangunan yang termasuk dalam *force* adalah segala bentuk pemaksaan ruang, termasuk di dalamnya pengurungan (penjara, institusi peenjara) dan pengasingan (benteng abad pertengahan, batas rumah, kunci, palang, dan dinding).



Gambar 2.1. Penjara, sebagai salah satu bentuk pemaksaan ruang
Sumber: www.gabesguide.com/prison.jpg

2. *Coercion* / Paksaan

⁴ Rorty (1992:47;Pred 1982), dikutip oleh Kim Dovey, Framing Places Mediting Power in Built Form. Hlm. 9

⁵ Maggie Toy (1995:7), dikutip oleh Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, Power Architecture. Hlm. 5

⁶ Maggie Toy (1995:7), dikutip oleh Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga, Power Architecture. Hlm. 5

Paksaan adalah ancaman dari sebuah kekuatan untuk menjamin pelaksanaan keinginan seseorang. Koersi dapat dikatakan sebagai bahaya laten, dan lebih efektif daripada force. Hal ini dikarenakan koersi dilakukan secara sukarela. Selain itu, koersi mendapatkan kekuatan dengan cara memberikan sanksi, dimana sanksi ini mencegah subjek melakukan perlawanan. Perwujudan koersi dalam bentuk bangunan, dilakukan melalui 3 cara:

a. *Domination / intimidation*

Dominasi atau intimidasi yaitu ketika bentuk arsitektur, tata kota, dan tata ruang dapat menjadi sebuah tanda adanya ancaman dari sebuah kekuatan. Contohnya adalah pengawal kerajaan, parade militer dan respon militer. Hal ini menjadi tanda bahwa dominasi atau intimidasi dapat menjadi bahaya laten bagi objek. Monumen, menggunakan memori masa lalu terhadap sebuah kekuatan yang dilakukan oleh negara, dimaksudkan untuk diingat di masa depan.



Gambar 2.2. Parade pengawal kerajaan Inggris,
Salah satu bentuk dominasi/intimidasi

Sumber: www.pix.com./landscapes/europe/england.jpg

Ada bentuk yang lebih halus dari koersi, yang dihubungkan dengan istilah dalam bahasa Latin yaitu *coercere*, "to surround". Menurut Weinstein, kontrol ruang yang terorganisasi merupakan bentuk pemaksaan.

Koersi mengubah sesuatu yang privat, komunal, kelompok atau ruang budaya ke dalam ruang yang terorganisasi, dimana perilaku objek yang berada di dalamnya dituntun untuk menjalankan rencana orang lain, atau melakukan pencegahan terhadap munculnya aksi untuk menggulingkan kekuatan yang ada.

Lingkung bangun membingkai kehidupan sehari-hari dengan memberikan ruang yang pasti untuk melakukan aktivitas, dan menutup kemungkinan yang lain. Dengan berbagai cara, setiap hari kita menghindari perilaku dan batas yang kita percaya dapat membuat kita berurusan dengan sebuah kekuatan. Kebanyakan bentuk ruang yang di dalamnya terdapat pengawasan dan kontrol, merupakan sebuah bentuk koersi.,

b. *Manipulation*

Manipulasi merupakan sebuah bentuk koersi yang dilaksanakan dengan cara membuat subjek berada dalam ketidaktahuan. Pelaksanaannya dibuat tidak terlihat dan menghilangkan kemungkinan timbulnya perlawanan.⁷ Subjek dibingkai dalam sebuah situasi seolah-olah dibebaskan untuk memilih, akan tetapi ternyata terdapat suatu maksud tertentu. Contoh dalam arsitektur dan perancangan kota adalah gambaran tentang proyek perancangan yang diubah untuk menciptakan sebuah bentuk dari persetujuan yang dimanipulasi, tanpa sepengetahuan partisipan.

c. *Seduction*

Seduction merupakan praktek manipulasi perhatian dan keinginan subjek. Hal ini memiliki kerumitan yang tinggi, merupakan kunci pembentukan keinginan dan identitas diri, dan sangat mempengaruhi pembentukan lingkung bangun. *Seduction*

⁷ Wrong (1979), dikutip dari Kim Dovey, Framing Places Mediating Power in Built Form. hlm.11

dilakukan dengan cara membujuk objek. Ini merupakan praktek kuasa yang sangat menipu.

3. *Authority*

Otoritas adalah sebuah bentuk kuasa yang bergabung dalam struktur sebuah institusi masyarakat., misalnya negara, perusahaan pribadi dan keluarga. Otoritas dilambangkan dengan tidak adanya penentang, dan memiliki ciri-ciri dapat dipercaya, produktif, dan merupakan bentuk kekuatan yang stabil. Kekuatan ini dianggap stabil karena dalam pelaksanaannya, dia dapat dipercaya, mendapat pengakuan, dan dilaksanakan dengan sukarela. Ciri yang lain adalah, otoritas sangat menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan diskusi. Komunikasi dilakukan satu arah. Otoritas didukung oleh legitimasi, yaitu sesuatu yang menghubungkan otoritas dan keinginan publik. Hal ini dikarenakan otoritas seolah-olah melayani keinginan orang banyak, dalam kaitannya dengan negara adalah keinginan rakyat. Tipu daya merupakan salah satu bentuk yang penting dari legitimasi dalam praktek otoritas.⁸ Legitimasi mempunyai kekuatan yang luar biasa dikarenakan seseorang tidak dapat menentangnya, dan itulah cara kekuatan melaksanakan kuasanya. Contoh dari otoritas adalah ritual, upacara dan pameran simbolis

Mayoritas bentuk dari kuasa adalah isolasi. Kebanyakan bangunan dan perancangan kota merupakan percampuran dari seduksi, otoritas, dan koersi. Dalam prakteknya, kuasa dapat berubah dengan cepat dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Pada umumnya, kuasa berusaha untuk menyembunyikan konflik dan memperlihatkan apa yang diinginkan oleh subjek.

Power dapat diwadahi dalam berbagai dimensi. Ada beberapa dimensi yang dapat dipakai menurut Kim Dovey:

1. *Orientation/disorientation*

⁸ Olsen1993:33, dikutip oleh Kim Dovey, Framing Places Mediating Power in Built Form. hlm. 12

Bentuk bangunan dapat mengarahkan, tidak mengarahkan, atau mengorientasi kembali subjeknya, melalui tatanan ruang kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membangun sebuah peta pemikiran sampai kita dapat membayangkan dunia kita dan memperlihatkan orientasi kita.

2. Publicity/privacy

Ruang dalam sebuah bangunan dipisah-pisahkan dan orang-orang tertentu ditempatkan dalam tempat tertentu dan dibuat sebuah pengawasan sedangkan beberapa orang yang lain diperlakukan secara istimewa dan khusus.

3. Segregation/acces

Batas dan jalan kecil dapat memisahkan orang karena status, gender, ras, kelas, dan umur, membuat batas khusus untuk akses, kenyamanan, dan komunitas.

4. Nature/history

Bentuk bangunan selalu menggunakan metafora dan membangun mitologi untuk representasi politis. Sejarah yang membangun makna dapat dinaturalisasi untuk melegitimasi otoritas.

5. Stability/change

Bentuk bangunan memproduksi ilusi yang permanen, dari sebuah tatanan sosial yang stabil, dari sebuah kemungkinan yang tidak mungkin berubah. Semisal image dinamis dan inovasi dapat membuat ilusi dari kemajuan.

6. Authentic/fake

Kita hidup dalam sebuah dunia yang dipenuhi oleh simulakra dan representasi. Pencarian terhadap keaslian adalah pencarian terhadap kekuasaan, menjerat sebuah isu sebuah power.

7. Identity/difference

Sebuah tempat merupakan sebuah simbol sosial yang membangun identitas dan perbedaan dari manusia, budaya, institusi, dan negara. Identitas politik dan

perbedaan diwadahi dalam sebuah arena dalam gambaran ruang dan kelembaman sebuah bangunan dapat memastikan identitas sepanjang waktu.

8. *Dominant/docile*

Massa/volume bangunan dapat menunjukkan dominasi/intimidasi

9. *Place/ideology*

Pengalaman terhadap sebuah ruang mempunyai sebuah kapasitas untuk menggerakkan kita secara mendalam, membuka pertanyaan akan spirit (jiwa) kita secara lebih dalam, ke dasar, untuk membuka pertanyaan tentang semangat.

2.3 Representasi Kuasa dalam Ruang

Kuasa dapat diwujudkan dengan berbagai macam hal. Menurut Kim Dovey, ada 3 cara untuk mewujudkan kuasa, yaitu melalui *program, text, dan place*.

Hal yang sangat berkaitan dengan kuasa dalam program adalah *structuration, habitus, dan gaze*. Menurut Giddens, *theory of structuration* berdasarkan pada dua hal, yang pertama adalah *agency*: kapasitas untuk merubah dunia kita, dan yang kedua adalah *structure*: segala hal yang terorganisir dari sebuah sistem sosial dalam bentuk aturan dan sumber daya, kerangka berfikir tentang kemungkinan, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terealisasi atau tidaknya sebuah fikiran.

Dari sudut pandang ini, arsitektur dapat dipandang sebagai sebuah bentuk struktur, dan perilaku sosial dibingkai sebagai bentuk *agency*. Arsitektur dengan bentuknya yang pasti dapat memaksa penggunaannya dengan bentukan fisik. Misalnya penggunaan dinding, pagar, dsb.

Susunan ruang merupakan salah satu bentuk struktur, dan design adalah salah satu bentuk *agency*. Kuasa arsitektur membentuk ruang, pada akhirnya dapat membentuk habitus, dan habitus mendapatkan pengakuan secara sosial. Jika Sistem sosial sudah mengakui, maka sangsi dapat diterapkan. Text berkaitan dengan myth,

deconstruction, dan *capital symbol*. Place berkaitan dengan fenomenologi, ideologi, aksi dan representasi.

2.4 Ruang Publik sebagai Ruang Demokrasi

Kata publik diturunkan dari bahasa Latin *populus* ‘*people*’, yang mempunyai arti yang sangat luas. Di dalam kamus Oxford, sebagai kata kerja, publik didefinisikan sebagai hal yang berhubungan dengan semua orang, termasuk, mempengaruhi, atau berhubungan dengan masyarakat atau negara, dikuasai atau mewakili masyarakat, terbuka atau dapat dijangkau, dapat digunakan atau dibagi oleh seluruh anggota masyarakat, tidak dibatasi oleh privat, (pelayanan, dana dan kenyamanan, dsb) disediakan oleh pemerintah lokal atau pusat untuk masyarakat, dan didukung oleh pajak, terbuka untuk observasi, dilihat, atau dipelajari, terbuka, bertanggungjawab kepada masyarakat secara umum.

Sedangkan sebagai kata benda, *public* dapat diartikan sebagai ‘*in public*’, di sebuah tempat atau keadaan terbuka kepada pandangan publik, atau akses, sebuah negara, anggota komunitas.

Dalam kaitannya dengan pengertian *public space*, terdapat dua hal yang berkaitan, yaitu *public sphere* dan *public space*. *Public sphere* adalah sebuah area dalam kehidupan sosial dimana seseorang dapat secara bersama-sama dan secara bebas mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah sosial, dan diskusi tersebut dapat digolongkan sebagai aksi politik.⁹ *Public sphere* dapat dilihat sebagai sebuah teater modern dalam bermasyarakat dimana partisipasi politik dapat ditampilkan melalui media berbicara¹⁰ dan sebuah ruang bagi kehidupan sosial dimana opini publik dapat

⁹ Hauser, Gerrard, Vernacular Dialogue and the Rhetoricity of Public Opinion, Hal. 86, dikutip dari www.wikipedia.co.id.

¹⁰ Fraser, Nancy, “Rethinking The Public Sphere: A Contribution to the Critic of Actually Existing Democracy”, Hal.56-80, dikutip dari www.wikipedia.co.id

dibentuk.¹¹. Menurut Jurgen Habermas, jangkauan *public sphere* meliputi berbagai macam makna dan diimplikasikan dalam sebuah konsep ruang, arena sosial, dimana makna dapat disebutkan, didistribusikan, dan dinegosiasikan oleh sekelompok orang, dalam kasus ini disebut dengan publik.¹²

Sedangkan yang dimaksud dengan ruang publik (*public space*) adalah geografi dari *public sphere*.¹³ *Public space* mencakup ruang fisik dan nonfisik seperti jalan, taman, media, internet, pusat perbelanjaan, pemerintah dan organisasi lokal (semacam RT dan RW) dan bahkan seperti organisasi internasional seperti PBB. *Public space* pada prinsipnya adalah ruang umum yang lebih bebas penggunaannya dari partisipasi publik (meskipun tidak bebas dari peraturan).¹⁴

Arsitektur, adalah sebuah seni *res publica*¹⁵, itu artinya bahwa arsitektur adalah seni demokrasi^{16,17}. Demokrasi yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, pada saat yang sama, harus memiliki sebuah ruang untuk berkumpul bersama, bergembira, membentuk opini, dan menikmati dirinya sendiri. Hal ini merupakan hal yang mutlak, karena dengan adanya ruang publik tersebut, maka secara spontan orang dapat melakukan aksi politik dan dapat digunakan sebagai tempat *collective power*

¹¹ Asean, Robert, (1999), Toward a Normative Conception of Difference In Public Deliberating, Hal.115-129, dikutip dari www.wikipedia.co.id

¹² Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Hal.27, dikutip dari www.wikipedia.com

¹³ Low and Smith , The Politics of Public Space, dikutip oleh Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Soeharto, hlm.2

¹⁴ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Soeharto, hlm.2

¹⁵ Res Publica adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan privat, dan dilaksanakan oleh banyak orang

¹⁶ Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang terdiri atas dua kata yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti aturan, kekuatan, atau negara.

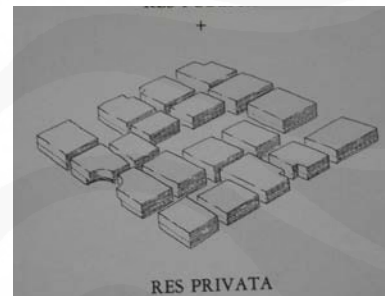
¹⁷ Charles Jencks, Democracy : The Ideology and Ideal of the West, hlm.7

masyarakat tumbuh dan berkembang. Tanpa ruang serta institusi yang mengatur penggunaan ruang tersebut maka, dapat dikatakan bahwa demokrasi akan mati.¹⁸

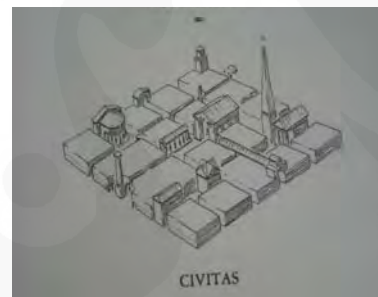
Monumen tanpa jalan dan ruang terbuka



Jalan dan ruang terbuka tanpa monument



Kota



Gambar 2.3. Res publika dan hubungannya dengan res privata

Sumber: Architectural Design, Vol.57 No. 9/10 1987

¹⁸ Charles Jencks, Charles Jencks, Democracy : The Ideology and Ideal of the West, hlm.7

Gambar tersebut menjelaskan bahwa, sebuah kota yang baik harus merupakan penggabungan dari unsur-unsur *res privata* dan *res publica*. Kepentingan-kepentingan semua pihak terakomodir dalam ruang kota.

Ruang – ruang seperti ini harusnya berada dimana saja, di tempat warga negara dapat bertemu dan berkumpul untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan untuk masyarakat secara bebas, dari intervensi kekuatan-kekuatan di luar pertemuan tersebut.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ruang publik di dalam kota, seharusnya memiliki ruang yang mampu menampung spontanitas publik dan aksi-aksi politik, dan terbebas dari pemaknaan privat.. Akan tetapi ,ruang publik tidak selamanya bebas dari pemaknaan kuasa dari seseorang ataupun institusi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan dan penguasa, pemaknaan ini juga dikarenakan ruang publik merupakan unsur yang fundamental dalam konteks politik dan demokrasi.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa, ruang publik menjadi salah satu elemen terpenting dari demokrasi. Dengan tidak adanya ruang publik, kita tidak dapat merasakan dan mengeluarkan pikiran kolektif, sehingga dapat dikatakan tidak dapat berdemokrasi. Sebuah wacana dapat terbentuk di ruang publik karena orang berhak atau diizinkan untuk berkumpul, belajar, berekreasi, dan berdebat (meskipun ada aturan mainnya).²⁰

Sebenarnya, menurut Charles Jencks, yang paling penting dari arsitektur sebagai elemen demokrasi adalah bagaimana si arsitektur tersebut dapat menjadi gambaran keseimbangan dari konflik kekuasaan, yaitu dengan menyediakan sebuah ruang publik untuk mempertemukan dua buah kepentingan tersebut.

¹⁹ Yasraf A Piliang, Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi

²⁰ Abidin Kusno, ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca Soeharto, hlm.2

2.5 Ruang-Ruang Demokrasi dalam Sejarah

Demokrasi bukanlah agama, akan tetapi konsep ini telah terbukti mampu mewadahi beragam kepentingan yang berseberangan. Demokrasi dianggap bisa menyeimbangkan kepentingan antara golongan kiri dengan kanan, antara golongan intelektual dengan *'philistine'* atau udik, ataupun antara penganut agama yang taat dengan kaum *agnostic* atau *atheis*. Hal inilah yang menyebabkan demokrasi sebagai konsep hidup bermasyarakat dapat bertahan lama, walaupun banyak penduduk yang tidak menyukai sistem ini.

Konsep demokrasi memang didefinisikan oleh orang-orang Yunani. Akan tetapi, sebenarnya konsep demokrasi secara sederhana telah dilakukan oleh orang-orang di luar Yunani, salah satunya adalah kiva, istilah suku Hopi (Indian) untuk sebuah ruang yang digunakan untuk upacara adat. Upacara adat ini diikuti oleh para pria suku Hopi dengan tujuan untuk melakukan ritual rahasia pemilihan kepala suku. Suku ini melakukan ritual di sebuah ruang yang di dalamnya terdapat bangku-bangku panjang dan dinding ceruk, yang dikelilingi oleh tiang-tiang pancang yang terbuat dari kayu. Ruang yang digunakan merupakan sebuah ruangan yang berada di bawah tanah, dengan pintu masuk di bawah lantai. Para lelaki memasuki ruang tersebut dengan cara memasuki sebuah lubang di atap, yang sekaligus berfungsi sebagai cerobong asap, dan merupakan satu-satunya akses masuk, lalu turun ke ruangan tersebut dengan menggunakan tangga. Lubang ini disebut dengan *sipapu*.



Gambar 2.4. Kiva, sebuah ruang yang digunakan oleh suku Hopi (Indian), untuk memilih kepala suku

Sumber: www.travel.webshot.com

Universitas Indonesia

Beberapa kota di Eropa, pada abad pertengahan juga telah memperlihatkan adanya tanda-tanda demokrasi. Sebagai contohnya adalah Landsgemeinde atau *cantonal assembly* di Swiss.



Gambar 2.5. Landsgemeinde, merupakan peristiwa pemilihan walikota secara langsung di Swiss

Sumber: Architectural Design Vol. 57 No. 9/10 1987

Landsgemeinde merupakan bentuk demokrasi yang bertujuan untuk memutuskan perkara hukum di kotapraja di Swiss, yang diputuskan oleh anggota dewan kota. Setiap penduduk yang memenuhi syarat diperbolehkan untuk hadir dalam landsgemeinde. Pertemuannya dilakukan pada hari-hari tertentu, di sebuah ruang terbuka. Setiap orang yang hadir diperbolehkan untuk mendebat dan mengajukan pertanyaan terhadap sebuah isu. Keputusan diambil dengan menggunakan cara voting. Setiap penduduk yang hadir berhak menggunakan suaranya. Biasanya, para wanita dan pria yang telah mendapatkan izin, dapat melihat pertunjukkan dari bayonet (militer Swis). Bahkan, sampai sekarangpun Landsgemeinde masih berlangsung di beberapa kotapraja di Swiss, salah satunya adalah Glarus.

Yunani merupakan pusat perkembangan demokrasi. Demokrasi berkembang mempengaruhi kota-kota di sekitarnya. Bahkan sampai saat ini demokrasi terus berkembang, walaupun konsep demokrasi pada saat ini juga ikut berkembang, tidak

Universitas Indonesia

sesederhana demokrasi pada saat itu. Salah satu kota yang terpengaruh dengan demokrasi adalah Romawi. Republik Romawi menyerap ide orang-orang Yunani yang mencampurkan elemen sistem monarki, demokrasi, dan aristokrasi. Romawi digambarkan sebagai elemen dari monarki aristokrasi, akan tetapi kekuasaan tetap terletak pada rakyat, yang sering disebut dengan demokrasi. Tidak seperti Yunani, yang penduduknya secara langsung memilih wakil rakyat, bentuk negara romawi adalah republik, yaitu pemilihan dilakukan berdasarkan keterwakilan. Walaupun pada kenyataannya, 300 orang senat selalu dikontrol oleh keluarga bangsawan.

Demokrasi di Romawi ini dilakukan di dalam sebuah forum, dalam sebuah pertemuan di pusat kota. Pusat kota ini dijadikan pusat aktivitas oleh warga negara. Bahkan, delapan belas abad setelahnya, tipe ini masih dijadikan *prototype* ibukota negara, misalnya Perancis dan Amerika.



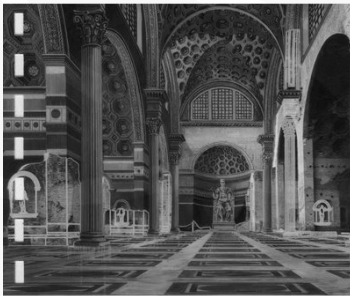
Gambar 2.6. Sebuah forum square di Romawi

Sumber: www.architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-romawi.html

Forum tersebut adalah sebuah *public square*, yang dikelilingi oleh bangunan monumental, termasuk di dalamnya adalah gedung senat, gereja model kuno, dan kuil. Menurut Vitruvius, orang-orang Romawi mengadopsi bentuk ruang square yang ukurannya lebih besar daripada milik orang – orang Yunani, hal ini dikarenakan Romawi memiliki tradisi pertarungan gladiator. Tipe bangunan forum terdiri atas 3 fasad : curia, duumvirs, dan aediles. Forum ini dikelilingi oleh sebuah ruang terbuka, yang disebut dengan comitium, yaitu tempat melakukan voting. Di sisi selatan,

Universitas Indonesia

terdapat curia, tempat warga negara melakukan orasi dari tribun yang biasa disebut dengan rostra. Di sisi sebaliknya, terdapat basilica, yaitu semacam ruang pengadilan. Di sisi terakhir, terdapat regia, yaitu pusat ritual, yaitu pusat penyembahan dewa-dewa bagi warga.



Gambar 2.7. Basilica, yang digunakan sebagai ruang pengadilan

Sumber:

www.architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-romawi.html



Gambar 2.8. Colosseum, tempat rakyat melakukan tradisi pertarungan gladiator

Sumber:

www.architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-romawi.html

Contoh ruang publik zaman antik dapat dilihat di Yunani. Perkembangan negara kota Yunani, atau polis, merupakan kunci evolusi demokrasi, dan Agora adalah jantungnya. Agora merupakan pusat politik, komersial, administrasi, pusat aktivitas sosial, serta pusat religi dan budaya. Negara kota ini digambarkan sebagai negara dengan penduduk yang memiliki kebebasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lain di masanya.

Sekitar tahun 700 Sebelum Masehi, sistem kerajaan yang digunakan di Yunani diganti dengan konstitusi tertulis, yang memastikan kekuasaan politik tidak jatuh pada satu golongan saja. Kekuasaan dibagi menjadi beberapa kelompok.

Definisi demokrasi di masa itu diartikan sebagai pemerintahan yang langsung dipilih oleh para pria dewasa yang telah cukup umur. Di Periclean, Athena,

Universitas Indonesia

sebenarnya terdapat sekitar 40.000 penduduk bebas, dengan total populasinya 150.000, dan 100.000 diantaranya merupakan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Walaupun menurut pengertian demokrasi saat ini itu sangat tidak adil, namun dari sanalah akar sejarah demokrasi dimulai, dalam sebuah institusi yang besar, yaitu sebuah negara kota, dilindungi oleh hukum, serta disediakan bangunan dan ruang untuk berdemokrasi. Hal ini juga merupakan sebuah peningkatan yang besar di zamannya.

Demokrasi dimulai di Athena, setelah reformasi Cleisthenes pada tahun 507 SM. Pada saat itu, demokrasi benar-benar mulai berkembang, memperoleh kekuatan, dan mempengaruhi negara-negara sekutu Athena. Masing-masing polis mempunyai agora, yang dikhususkan oleh orang-orang Yunani untuk menyatukan aktivitas publik dan bangunan yang mendukung keberlangsungan demokrasi. Karakter yang terpenting dari pusat kota ini adalah kontinuitas aktivitas, keberagaman aktivitas, perputaran kehidupan sosial, bisnis, dan politik dalam space yang relatif kecil, sehingga Agora menjadi semacam *public realm* di Athena.

Agora dapat diartikan sebagai sebuah tempat dimana orang-orang dapat berkumpul. Ruang terbuka yang datar dari Agora merupakan ruang berkumpul yang baik serta digunakan sebagai tempat orang menyampaikan pendapat dengan berorasi dan dengan menggunakan suara yang lantang di tribun.

Agora merupakan inti dari polis dan menjadi model bagaimana kota masa depan dikembangkan. Agora dikembangkan dengan menggunakan jalan sebagai semacam inti untuk kemudian dipancarkan keluar. Bangunan yang dibangun di Agora merupakan bangunan publik yang kira-kira sama dengan bangunan demokrasi modern: bouleuterion (dewan kota) , prytaneion (balai kota dan istana) , stoa (ruang yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti toko, debat, dan galeri) serta heliaea (pengadilan). Bangunan-bangunan tersebut merupakan tipe bangunan dasar dari demokrasi. Di setiap bangunan ini selalu terdapat bentuk U mengelilingi

sebuah plaza atau teras miring (untuk pertemuan terbuka), kuil untuk menyembah Tuhan, dan banyak sekali tempat pemujaan.

Agora, sebagai pusat kota terbesar di Yunani, tetap melayani berbagai macam fungsi. Selain digunakan sebagai ruang berkumpul, di Agora juga disediakan tempat pemujaan dewa Apollo dan Zeus. Apollodoros mengidentifikasi betapa pentingnya Agora, dimana semua orang menjumpai majelis mereka, yang mereka sebut dengan agorai. Tidak hanya digunakan oleh kaum mayoritas, kaum tiran di Athena juga berpartisipasi aktif melakukan berbagai macam kegiatan di Agora, salah satunya adalah membangun beberapa monumen dan air mancur, yang di dekatnya dibangun altar untuk 12 Tuhan yang didedikasikan untuk memperlihatkan bahwa wilayah tersebut tidak hanya sebagai pusat orang-orang Athena, akan tetapi juga Attica. Jalan suci utama, atau yang biasa disebut dengan Panathenic way, memotong langsung menuju Agora dengan sebuah sudut, dan terhubung langsung dengan pusat kota yang lain, yaitu Acropolis.

Dari sini kita dapat melihat bahwa arsitektur digunakan oleh kaum tiran, sebagai alat untuk berhimpun dan berbicara, tidak hanya sebagai simbol kekuasaan dan penghimpunan kekuatan kaum mayoritas.

Pasca kerusakan yang dibuat perang melawan Persia, Agora kembali dibangun sedikit demi sedikit tetapi dalam bentuk yang lebih geometris. Bangunan yang dibangun tersebut adalah : sebuah bouleuterion persegi (untuk tempat dewan betemu) , sebuah kuil persegi untuk Hephaestus, kuil yang dibangun untuk Apollo, dan di sudut paling utara, sebuah Doric yang sangat besar dengan atap segitiga yang diproyeksikan di sisi sayap. Dibangun dengan gaya arsitektur Periclean seperti Parthenon, bangunan ini didedikasikan untuk Zeus, "Tuhan kebebasan" dan digunakan untuk berbagai macam aktivitas di Agora. Lebih lanjut, beberapa colonnades ditambahkan di utara stoa, dibangun di akhir abad kelima SM, sebuah lawcourt berbentuk persegi ditambahkan di sebelah barat , dan di abad kedua , Stoa

atallos, sebuah struktur linear dari dua lantai, dibangun di sebelah timur. Bangunan ini dibangun di abad 20 dan menunjukkan pola pengulangan yang cantik dari tipe stoa.

Platonic sederhana, yang masing-masing berdiri sendiri, dibuat mengelilingi tempat berkumpul utama. Dibangun pula sebuah 'orchestra', dengan pintu keluar yang besar dan langsung terhubung dengan pynx, mampu menampung sekitar 10.000 penduduk. Penduduk duduk di area miring wajah kota. Teater juga digunakan, terutama di masa Romawi, untuk mengakomodasi seluruh penduduk dalam debat politik, salah satunya dalam bentuk sebuah majelis, yaitu sebuah pertemuan massa dari penduduk asli Attica. Majelis ini merupakan badan legislatif yang mengontrol administrasi dan hukum. Pertemuan dilakukan satu kali selama satu bulan, jika tidak bersidang, maka teater digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan masalah ini akan dibahas oleh dewan yang beranggotakan 500 orang, 50 orang diantaranya dipilih oleh pemungutan suara dari masing-masing suku.

Walaupun dibahas oleh anggota dewan, akan tetapi, penduduk dapat secara langsung memutuskan untuk mengambil bagian dalam pembahasan isu, yang menyangkut dengan kepentingan dirinya, dan ini merupakan salah satu contoh demokrasi, walaupun hanya terbatas pada kaum laki-laki saja.

Sebenarnya, pusat kehidupan kota di Yunani adalah prytaneion, atau balai kota, yang direpresentasikan sebagai rumah penduduk Yunani. Di sini, orang-orang dijamu makan malam, kecuali wanita. Prytaneion merupakan jantung dari kota, dan dengan aktivitas yang berbagai macam, maka jantung ini akan terus menerus hidup.

Di dekat Prytaneion, terdapat bouleuterion, atau dewan kota, yang mempunyai anggota sekitar 500 orang. Di dalamnya terdapat galeri publik dan semacam amphiteater. Bentuk dari bouletarian ini memungkinkan terjadinya interaksi debat.

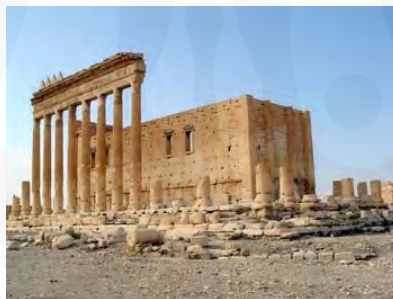
Ruang-ruang demokrasi di Yunani tidak terbatas di Agora saja. Tetracylon, yang berada di dekat Agora di sebuah negara kota yang bernama Palmyra, merupakan

sebuah panggung yang diset untuk aksi demokrasi. Empat piazza di jalan utama Palmyra digunakan penduduk untuk berkumpul dan membicarakan bisnis serta politik. Disini, simbol kekuasaan hadir bersama-sama: yaitu arsitektur yang monumental serta patung-patung yang menggambarkan kekuasaan pemerintah. Akan tetapi, kebanyakan ruang terbuka tidak hanya digunakan sebagai simbol, akan tetapi menggambarkan kekuatan warga kota, mereka mempunyai hak untuk bersuara secara bebas dan membentuk kelompok sesuai dengan ketertarikan mereka.



Gambar 2.9. Tetrapylon, yang digunakan masyarakat Yunani untuk melakukan orasi

Sumber: www.wikipedia.com



Gambar 2.10. Kuil Bel di Palmyra, yang digunakan untuk penyembahan terhadap dewa

Sumber: www.wikipedia.com

Yunani dapat mengakomodasi seluruh kegiatan berdemokrasi warganya, dikarenakan sebuah polis di Yunani memiliki penduduk antara 5.000 – 10.000 penduduk, sebuah jumlah yang ideal menurut Aristoteles dan Plato. Hal ini

dikarenakan orang dapat mengetahui satu sama lain dan dikumpulkan di Agora sebagai sebuah kelompok, untuk memformulasikan opini politik.

Menurut Aristoteles, komunitas politik harus dibatasi, sehingga masing-masing anggota komunitas dapat saling mengetahui dan mengenal. Hal ini penting untuk memutuskan untuk mempertanyakan keadilan serta mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan keahlian, dan untuk mengetahui karakteristik masing-masing. Kecilnya ukuran negara kota sangat berbeda dengan kondisi saat ini, dengan struktur politik dan warga kota yang bercampur dan mempunyai jumlah yang sangat besar, membuat skalanya menjadi sangat besar. Lain dengan Agora, yang memfokuskan ruang terbuka, yang menjadi standar demokrasi saat ini politisi hanya sesekali saja menggunakan ruang terbuka untuk aktivitas politiknya.

Polis menjamin warga negaranya untuk melakukan aksi dan berbicara. Sehingga, Agora dapat dikatakan sebagai bentuk ideal dari arsitektur, secara fisik maupun penyediaan ruang terbuka untuk aktivitas demokrasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu arsitektur di Agora, dengan menggunakan ornamen-ornamen digunakan sebagai simbol aksi masa, dipakai untuk menunjukkan perbedaan, sehingga membuat berbicara dan aksi menjadi sangat penting.



Gambar 2.11. Bangunan dan struktur Agora pada abad ke-5 Sebelum Masehi

Sumber: www.geocities.com/01/Agora.html

Universitas Indonesia

Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Peristyle Court | 6. Strategeion |
| 2. Mint | 7. Colonos Agoraios |
| 3. Enneacronous | 8. Tholos |
| 4. South stoa I dan south stoa II | 9. Agora stone |
| 5. Heliaea | 10. Monument of the Eponymous Heroes |

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah definisi tentang ruang demokrasi adalah sebuah ruang publik yang harus dilengkapi dengan sebuah tempat dimana rakyat dapat berkumpul bersama, beramah tamah , serta membentuk opini. Semua warga negara yang mampu berkomunikasi dapat berpartisipasi dalam ruang tersebut, serta harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari represi dan diskriminasi, sehingga para partisipan dapat memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Singkatnya, ruang tersebut harus inklusif, egaliter, dan bebas tekanan.

BAB 3

KUASA dan RUANG PUBLIK di INDONESIA

MASA KOLONIAL dan PASCA KOLONIAL

3.1 Belanda dan Sistem Rasial dalam Ruang Publik

Keberadaan Belanda di Indonesia sebagai penjajah sedikit banyak berpengaruh pada tata ruang kota Jakarta saat ini. Jakarta, yang dulu disebut dengan Batavia mulai mengalami perkembangan, ketika di Belanda mengalami reformasi. Beberapa kalangan di Belanda menganggap bahwa daerah jajahan juga memiliki hak untuk dikembangkan.

Selain karena hal tersebut, Batavia dikembangkan karena penduduk Eropa pada masa itu mulai bertambah. Oleh karena itu, Batavia mulai diatur. Dengan menggunakan defensielij van den Bosch sebuah pengaturan yang efisien, dengan penyatuan jalanan yang tadinya terpisah dan pelebaran jalan-jalan yang dibutuhkan. Sehingga, terbentuklah kota baru yang pada dasarnya sangat Eropa.

Pembanguan Weltreveden secara umum dapat dibagi menjadi dua, yang pertama berada di selatan dan merupakan daerah-daerah permukiman orang-orang Eropa yang kaya, sementara bagian utara terdapat toko-toko mewah Batavia.

Pada awal abad 20, Batavia sedikit sekali memiliki jalanan beraspal, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Akhirnya serangkaian pembangunan dilaksanakan pada masa ini. Pembukaan jalan mengakibatkan dibukanya perumahan-perumahan baru.

Pembangunan perumahan Eropa seperti Menteng dan Gondangdia merupakan suatu perpecahan terhadap tradisi indis yang dahulu kala mendominasi. Struktur tata letak rumah indisce memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih kuat antara orang Belanda atau Indo dengan pribumi.²¹ Mengikuti jalanan utama, rumah-rumah para

²¹ Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno*, hlm.117

sinyo diletakkan di paling depannya. Lalu di bagian belakangnya terdapat kampung-kampung pribumi.

Perumahan-perumahan yang membelakangi perumahan pribumi merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk membedakan kelas dan ras. Orang-orang kulit putih tidak ingin dekat-dekat dengan orang-orang Inlander.²² Dalam teori tata kota colonial terdapat suatu dualism perkotaan yang disebabkan oleh perbedaan masyarakat yang berdasar bukan hanya pada kelas , tetapi pada hal yang fundamental: perbedaan ras, kebudayaan, sistem ekonomi, dan seterusnya. Hal ini dibedakan berdasarkan warna kulit.

Untuk menghindari daerah kampung yang yang dianggap menjadi sumber penyakit dan berbahaya, dibangunlah sebuah lingkungan yang sepenuhnya didukung oleh kemodernan Barat yang aman.

Kotapraja Batavia menugaskan Karsten untuk mengatur ulang lapangan yang waktu itu bernama *koningsplein*. Dia mengembangkan taman tersebut sebagai bagian integral dari fungsi perkotaan. Gedung Dewan kotapraja (*Raadhius*) yang baru harusnya diletakkan di dekat pusat lapangan , sementara itu bagian-bagian dalam lapangan disediakan untuk gedung-gedung umum. Sebuah monumen dipersiapkan menghadap *Raadhius*. Di bagian selatan dari lapangan terdapat sebuah rencana pembangunan lapangan permainan kriket, sementara di sepanjang bagian timurnya bersebelahan dengan stasiun gambir. Hampir setiap bagian dari lapangan dimanfaatkan untk kepentingan penduduk.

Akan tetapi, penatannya ternyata rasial.²³ Seperti yang pernah dikatakan oleh Karsten:”Guna pengaturan keseluruhan kota, untuk menghindari ketidakinginan dari keadaan yang tidak tertata dan teratur yang mengakibatkan percampuran dari jenis-

²² Farabi Fakhri, Membayangkan Ibu kota Jakarta di Bawah Soekarno, hlm.118-119

²³ Farabi Fakhri, Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno, hal.120-121

jenis bangunan yang tidak berdasarkan sesama jenis, maka sebuah penzanaan atau pemisahan berdasarkan kelas tidak dapat dihindarkan”.

Dengan kata lain, lapangan tersebut merupakan bagian dari pemisahan kelas. Hal lain adalah pembangunan lapangan kriket yang notabene permainan yang berasal dari Eropa, dan tidak memungkinkan bagi warga Indonesia untuk memainkan permainan tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, Belanda, sebagai penjajah dan penguasa pada masa tersebut menggunakan kekuasaannya dengan media tata ruang kota untuk memisahkan kelas. Kelas yang dimaksud adalah kelas orang Eropa, dan pribumi.

3.2 Soekarno, Kuasa dan Jalan sebagai Media Revolusi

Pada masa kepemimpinannya, soekarno menggunakan jalan untuk melakukan politik revolusinya.

3.2.1 Soekarno dan Kuasa

Indonesia pada akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mengalami penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Indonesia pasca kemerdekaan adalah sebuah bangsa yang bebas menentukan masa depannya sendiri. Indonesia pada saat itu merupakan sebuah negara yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi – tradisi otoriter, maka banyak yang bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan Indonesia. Akan tetapi, sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 sebagian merupakan kisah tentang kegagalan kelompok-kelompok pimpinan secara berturut-turut untuk memenuhi harapan-harapan yang tinggi pasca kemerdekaan. Dari tahun 1950-1957, terdapat tujuh kabinet. Hampir tiap tahun kabinet di Republik Indonesia ini diganti karena

kegagalannya. Sampai pada akhirnya, hanya Soekarno dan Hatta yang dapat bertahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Kepemimpinannya telah terlihat sejak beliau kecil. Dalam sejarah kehidupannya, Soekarno merupakan tipe pemimpin pemersatu, dan bukan seorang administrator. Beliau sangat menyukai orasi. Orasi- orasi ini dipakai Soekarno untuk mengembar-gemborkan revolusi pasca penjajahan Belanda.

Gaya kepemimpinan Soekarno mirip dengan sebuah filsafat kuasa Jawa. Kuasa, menurut filsafat Jawa terkonsentrasi pada satu individu yang memiliki kharisma. Kuasa Jawa memiliki sifat yang berbeda dengan sifat kuasa barat. Dalam pandangan Jawa, kuasa adalah hal yang konkret. Ia bukanlah sebuah teori, melainkan suatu kenyataan eksistensial. Kekuasaan adalah tenaga yang tak tampak, misterius, dan bersifat ilahiah yang menghidupi alam semesta. Ia homogen, dalam artian bahwa semua kekuasaan adalah sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama. Ia bersifat konstan sehingga, penambahan kekuasaan pada satu titik berarti pengurangan kekuasaan pada titik lainnya dan terakhir kekuasaan tidak mempertanyakan keabsahan. Ia tidak perlu untuk mendapatkan alasan moral untuk menyatakan keberadaannya.²⁴

Dalam kekuasaan tradisional Jawa, maka kraton atau istana adalah pusat dimana segala kekuasaan akan memancar darinya. Maka, Soekarno menjadikan Jakarta, yang merupakan ibu kota negara Indonesia, sebagai pemancar kekuasaan bagi Soekarno.

Media yang digunakan untuk memancarkan kekuasaan Soekarno adalah arsitektur dan perencanaan kota Jakarta. Soekarno adalah orang yang amat setia terhadap ide bahwa arsitektur dan perencanaan kota dapat menciptakan sebuah

²⁴ Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*, hlm.120

masyarakat ideal.²⁵ Pada masa kepemimpinannya, Soekarno membangun proyek-proyek besar di Jakarta. Sebagai contohnya, dalam rangka Asean Games yang keempat, Soekarno membangun Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Departemen Store Sarinah, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Patung Dirgantara, dan Patung Pahlawan. Soekarno menganggap bahwa bangunan merupakan esensi dari kepercayaan dan kebanggaan sebuah bangsa. Jiwa dan hasrat dari sebuah bangsa ada pada gedung-gedungnya. Baginya, Indonesia pada saat itu sedang terkungkung dalam sebuah keadaan dua dimensi, dan harus segera beralih pada zaman tiga dimensi. Dan proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Soekarno pada masa itu adalah gambarannya. Membangun bangunan menurut Soekarno merupakan hal yang sangat penting, sepenting memakai celana dan baju, dan untuk membuat bangsa lain kagum.²⁶ Membangun Djakarta secantik mungkin, membangunnya sehebat mungkin, agar kota ini, yang telah menjadi pusat dari perjuangan rakyat Indonesia, akan menjadi sebuah inspirasi dan sebuah mercusuar bagi perjuangan manusia kepada semua Nefo. Jika Mesir dapat membangun ibukotanya, Italia memiliki Roma, Perancis dengan Paris dan Brasil dengan Brasilia, maka Indonesia juga harus dengan bangga memperlihatkan Jakarta sebagai pintu masuk negara.²⁷

Pidato ini menggambarkan bahwa Jakarta yang diinginkan oleh Soekarno merupakan Jakarta yang dapat menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa lain. Mercusuar bagi perjuangan melawan penjajah, dan rakyat Indonesia menganggapnya sebagai kebanggaan jiwa dan hasrat. Hal ini menjadikan kebanyakan bangunan dan proyek Soekarno terbatas pada kolase ide dan nasionalisme, akan tetapi tidak memiliki fungsi yang spesifik.

²⁵ Farabi Fakih, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*, hlm. 50

²⁶ Farabi Fakih, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*, hlm.53

²⁷ Farabi Fakih, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*

Ada 3 alasan yang membuat Soekarno membangun Jakarta:

1. Rancangan-rancangan Soekarno merupakan bagian dari cara untuk memperkuat rezim otoriternya, sebagai bagian dari perencanaan politisnya yang lebih besar. Jakarta dilihat hanya sebagai satu aspek dari tindakan politik yang lebih besar untuk mengamankan otoritasnya terhadap bangsa.
2. Pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Soekarno merupakan usahanya untuk meningkatkan rasa percaya diri dari bangsa Indonesia pasca penjajahan.
3. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang dipakai oleh Soekarno, memiliki persamaan dengan Jawa prakolonial daripada dengan pergerakan modernis dalam arsitektur.²⁸

Pembangunan dari stadion, monument, jalan-jalan lebar dan ruang-ruang publik yang luas sebagai bagian terpenting dari ibukota diharapkan untuk menyampaikan sebuah ekspresi, atau sebuah perjuangan terhadap, legitimasi yang mirip dalam hal fungsi terhadap upacara-upacara kraton pada masa pra kolonial.

Untuk membangun Jakarta sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Soekarno, maka diperlukan dukungan dari penguasa Jakarta, dalam hal ini walikota dan gubernur. Dalam pemilihan Gubernur Jakarta, Soekarno langsung terlibat. Ada beberapa kasus yang menarik mengenai jauhnya Soekarno dalam hal turut campur memilih Gubernur. Hal ini dikarenakan untuk membangun Jakarta seperti yang diinginkan, Soekarno membutuhkan sebuah legitimasi.

Ketika Soekarno memunculkan demokrasi terpimpin, pada tahun 1957 keharmonisan antara Pemda dengan pemerintah pusat mulai meretak. Salah satu penyebabnya adalah ditolaknya permintaan Soekarno untuk menghilangkan trem, yang dianggap tidak sesuai dengan visi modern yang ingin Soekarno tanamkan di Jarta. Maka oleh karena hal tersebut, Soediro sebagai gubernur masa itu memutuskan

²⁸ Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*, hlm. 50 Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*, hlm. 54

untuk tidak maju lagi sebagai Gubernur. Bertolak belakang dengan Soediro, Henk Ngantung dipilih sendiri oleh Soekarno untuk menjadi Gubernur pada tahun 1964. Selain turut campur secara langsung dalam pemilihan Gubernur, untuk memperkuat legitimasinya di dalam kota Jakarta, Beliau mengeluarkan sebuah peraturan yang dianggap aneh. Peraturan tersebut adalah Penpres No.2 / 1961 yang tidak jelas merinci tugas Gubernur, dan kira-kira berisi bahwa Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Instansi manapun yang berkepentingan terhadap Jakarta boleh melakukan tindakan.

3.2.2 Soekarno, Jalanan Ibu kota, dan Revolusi

Setelah merdeka dari Belanda 1950, Indonesia mencoba untuk menemukan sebuah sistem politik dimana populasi massa dari negara ini dapat mempengaruhi satu sama lain tanpa mempunyai figur pemimpin. Pada tahun 1960, bagaimanapun semua percobaan ini gagal.²⁹ Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia (1950-1965), akhirnya menyimpulkan bahwa negara ini membentuk sebuah kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan pribadinya. Baginya, krisis yang dialami bangsa Indonesia pasca kemerdekaan dikarenakan oleh hilangnya pusat. Indonesia harus bersatu. Untuk menacapai tujuan ini, sangat penting bagi Soekarno untuk menemukan sebuah cara untuk berkomunikasi dengan semua penduduk Indonesia, dan untuk meyakinkan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin rakyat, akan tetapi bagian dari rakyat itu sendiri.³⁰

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa gaya kepemimpinan Soekarno merupakan gaya kepemimpinan pemersatu dan bukan administrator. Gaya kepemimpinan pemersatu adalah gaya kepemimpinan yang percaya bahwa

²⁹ M.C.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm . 317-318

³⁰ Abidin Kusno, Behind the Postcolonial, hlm. 77

kebangsaan atau nasionalisme harus murni dari Indonesia. Mereka percaya kesatuan adalah lebih penting dari apapun. Orang dengan gaya kepemimpinan pemersatu akan lebih mementingkan retorika daripada proses, nasionalisme daripada diplomasi dan kerjasama. Dapat dikatakan bahwa golongan pemersatu adalah golongan yang terobsesi dengan politisasi kehidupan.. Konsep ini tercermin jelas dalam ketika masa demokrasi terpimpin dimana sebuah pemerintahan populis menganggap bahwa simbolisme politik lebih penting.

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral dalam sejarah Indonesia melainkan suatu unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia itu sendiri. Soekarno adalah salah satu pribadi yang sangat mengagung-agungkan revolusi. Menurut Hatta, Soekarno sangat terobsesi dengan revolusi abadinya.³¹

Soekarno sangat percaya bahwa supaya bangunan mempunyai kekuatan untuk mendidik dan merubah jiwa pemakai, ia harus dirancang seperti patung yang bisa dilihat secara tiga dimensi dari jarak tertentu. Soekarno sangat memuja estetika arsitektur modernis, terutama sistem pemanggungan dari gaya tersebut, berkaitan dengan sesuatu yang lebih pribadi.

Untuk mendidik dan merubah jiwa pemakai inilah Soekarno merencanakan membuat patung dan monument di jalan-jalan dan ruang publik di Jakarta. Hal ini dilakukan agar setiap penduduk yang melihat patung-patung tersebut teringat akan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai pembawa revolusi.

³¹ Farabi Fakhri, *Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno*, hlm. 47



Gambar 3.1. Soekarno menggunakan ruang-ruang publik untuk menyampaikan gagasannya akan revolusi

Sumber: buku Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Soeharto



Gambar 3.2. Objek pidato Soekarno, dibutuhkan jalan untuk memobilisasi pergerakan mereka

Sumber: buku Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Soeharto

3.3 Soeharto, Kuasa , dan Politik Jalan

Soeharto menggunakan politik jalan Orde Baru, yaitu menggunakan ketakutan untuk mencegah terjadinya pertentangan. Selain itu, Soeharto juga menggunakan program gerakan disiplin nasional sebagai legitimasinya.

3.3.1 Soeharto dan Kuasa

Setelah tahun 1965, Indonesia memasuki suatu tahapan baru dalam perkembangannya. Soekarno, telah diganti oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Soeharto dan sekutu-sekutunya menegakkan apa yang sering disebut dengan Orde Baru. PKI, yang menjadi sekutu Soekarno di akhir masa kepemimpinannya, dihancurkan secara fisik. Pada awal tahun 1967 Soeharto merasa bahwa langkah simbolis terakhir dalam rangka mengkonsolidasikan Orde Baru dapat diambil: menyingkirkan Soekarno.

Pada bulan Maret 1967 Majelis bersidang membebaskan Soekarno dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Pemerintahan Orde Baru Soeharto menjalankan kebijakan-kebijakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi, menyandarkan legitimasinya sebagian besar pada kemampuannya memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia yang sangat besar jumlahnya.

Selain mengisolasi Soekarno secara fisik di Bogor, Soeharto juga melakukan beberapa kebijakan dalam ruang kota, khususnya di Jakarta. Soeharto memutuskan untuk mengakhiri citra Jakarta sebagai kota mobilisasi yang manunggal. Hal ini dilakukan mungkin karena Soeharto merasa takut pada kekuatan manunggalnya Soekarno.

3.3.2 Soeharto dan Politik Jalan Orde Baru

Memori penduduk tentang Soekarno di Jakarta begitu melekat. Untuk melupakan memori ini, maka Soeharto harus mengakhiri citra Jakarta yang dibuat oleh Soekarno, yaitu citra Jakarta yang manunggal. Kemanunggalan ini akhirnya dibelah oleh Soeharto menurut pembentukan identitas berdasarkan kelas ekonomi dan perhitungan politik. atas pengontrolan identitas.

Soeharto melakukan pembunuhan hampir setengah juta penduduk yang dianggap komunis serta dibarengi dengan perubahan citra ruang kota, untuk menghilangkan kemandirian Soekarno. Ruang kota yang pada era Soekarno merupakan tempat mobilisasi rakyat, dirubah citranya menjadi tempat yang berbahaya dan perlu dijaga ketat oleh militer. Jalan, sebagai ruang publik dalam kota menjadi tempat yang berbahaya yang perlu diamankan.³² Salah satu kasus yang masih dapat diingat adalah kasus gali pada tahun 1980-an.

Pada tahun 1983-1984, di tengah kesibukan membangun jalan layang, mendirikan menara perkantoran, dan membangun perumahan, terjadi peristiwa gali. Warga kota menemukan mayat-mayat orang-orang bertato yang disebut sebagai gali di jalanan. Gali kebanyakan adalah anggota preman yang dipakai oleh orde baru untuk membantu memenangkan Pemilu 1982. Mereka dibunuh karena dianggap tidak lagi dibutuhkan. Mayatnya dibiarkan tergeletak di jalanan dan dijadikan bahan tontonan oleh masyarakat. Operasi ini didukung oleh negara.

Kasus yang terkenal dengan nama “Petrus-Penembak Misterius” dan “Matius-Mayat Misterius” ini diambil sari nama dua orang santo Katolik –Saint Peter (“Petrus”) dan saint Mathew (“Mathius”).³³ Nama-nama ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu, dan merupakan oknum-oknum yang pernah beroperasi di Timor Timur (yang mayoritas penduduk Katolik).³⁴ Timor Timur ditaklukkan dengan menggunakan operasi militer untuk penendalian masyarakat. Teknik kontrol sosial ini kemudian dibawa ke kota-kota lain termasuk Jakarta.³⁵

³² Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif :Jakarta Pasca-Soeharto, hlm. 47

³³ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca-Soeharto, hlm.47

³⁴ Benedict Anderson, The Influence of the East Timor , dikutip oleh Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif:Jakarta Pasca-Soeharto, hlm. 47

³⁵ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca –Soeharto, hlm. 47

Kita dapat melihat bahwa alasan demi keamanan nasional telah dipakai oleh Soeharto untuk memberikan terapi kejut untuk masyarakat. Demi keamanan nasional, Soeharto telah mengorbankan hak-hak kebebasan warganya.³⁶

Di sisi lain, ternyata Presiden Soeharto sangat bangga terhadap teknik meninggalkan mayat-mayat di jalan. Bagi beliau, ini adalah terapi kejut. Kejutan agar warga kota sadar dan tidak main-main di jalan dan menjadi gali. Soeharto membiarkan mayat-mayat tersebut di jalanan agar warga mengerti ,bahwa berhadapan dengan kriminal, tetap ada seorang yang akan bertindak dan mengontrol mereka.³⁷

Melalui pameran tubuh yang telah tak bernyawa tersebut, warga menjadi tahu bahwa mereka sedang diawasi, agar tidak berbuat macam-macam di jalanan. Negara hadir melalui mayat-mayat yang terhukum. Kekuasaan negara dalam diri mayat-mayat terhukum dimaksudkan untuk mendisiplinkan dan menormalisasikan publik secara umum.³⁸

Mayat-mayat tersebut juga digunakan untuk menyampaikan pesan bahwa negara mengirim pesan kepada rakyat kelas menengah ke bawah, karena rakyat kelas menengah ke bawah dianggap berpotensi untuk melakukan kriminal, untuk tidak menjadi gali. Sehingga, rakyat kelas menengah ke bawah harus berhati-hati dan tidak mencoba untuk menjadi gali atau berhati-hati terhadap kemungkinan untuk menjadi gali. Dengan cara ini, masyarakat kelas menengah menjadi takut dengan jalan, dan mereka pada akhirnya secara sadar atau tidak dipaksa untuk berfikir bahwa jalan memang perlu diamankan. Alhasil, jalanpun dikriminalisasikan dan dianggap penuh bahaya.

³⁶ www.policewatch.com

³⁷ www.policewatch.com

³⁸ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca –Soeharto, hlm. 48-49

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini dipakai sebagai terapi kejut bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa terus diawasi. Teknik penggabungan antara “penyiksaan di ruang publik” dan “penyerahan sukarela” berjalan bersama –sama untuk menguasai kepribadian generasi Soeharto.³⁹

Dalam kondisi sosial masyarakat, akhirnya memisahkan warga menjadi dua kategori, yaitu masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah, yang saling tergantung akan tetapi saling mencurigai. Masyarakat kelas menengah ini merupakan masyarakat yang patuh terhadap modernitas Orde Baru.

Menjelang akhir 1970-an, Soeharto berhadapan dengan generasi baru yang sama sekali tidak pernah mengalami revolusi. Di tahun-tahun tersebut terjadi banyak demonstrasi yang dilakukan oleh generasi tersebut . Salah satunya adalah peristiwa Malari. Malari, merupakan singkatan dari Malapetaka Lima Belas Januari. Demonstrasi ini berakhir dengan kerusuhan, dan belasan orang meninggal dunia. Kebebasan berpendapat, dibungkam oleh kekerasan sang penguasa.



Gambar 3.3. Kerusuhan Malari
Sumber: www.wikipedia.com/malari.html



Gambar 3.4. Jalan-jalan kota dipakai untuk berdemonstrasi
Sumber: www.wikipedia.com/malari.html

³⁹ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca –Soeharto, hlm.48-49



Gambar 3.5. Pengerahan militer untuk memadamkan aksi

Sumber: www.wikipedia.com/malari.html



Gambar 3.6. Penguasa yang dianggap bertanggung jawab

Sumber: www.wikipedia.com/malari.html

Demonstrasi di ruang publik membuat pemerintah sadar tentang pentingnya menjembatani keinginan para pemuda akan mobilitas ke atas.⁴⁰ Soeharto ditantang untuk membentuk generasi muda yang patuh dan modern. Untuk itulah, penguasa saat itu akhirnya membentuk citra baru dirinya, yaitu sebagai seorang kepala keluarga yang bijak, yang memperhatikan keluarganya. Sebaliknya, anggota keluarga harus tetap loyal dan mendisilinkan diri sendiri.

Soeharto meringkas prinsip-prinsip kepemimpinannya sebagai berikut:

Dalam upaya mengembangkan disiplin diri sendiri suatu metode pendidikan dibutuhkan...Metode ini (“Tut Wuri Handayani”) ditujukan tidak untuk siapa-siapa kecuali untuk memberi berbagai kesempatan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengembangkan disiplin diri sendiri secara natural, melalui pengalaman-pengalamannya, pemahannya, dan upayanya sendiri. Apa yang butuh untuk diawasi adalah pemberian kesempatan-kesempatan itu sebaiknya tidak membahayakan anak itu sendiri atau tidak memberikan ancaman kepada yang lain.

Generasi baru ini akan menuruti representasi budaya dan politik ideologi pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini bukan hanya pembangunan

⁴⁰ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca Soeharto

secara ekonomi, akan tetapi lebih kepada budaya politik. “Pembangunan” memberi kesempatan kepada Soeharto tidak untuk memimpin di depan, akan tetapi mendorong dari belakang. Citra Soekarno dapat dilihat dari pidato-pidatonya, maka citra Soeharto digambarkan dengan jenderal yang tersenyum, akan tetapi sebenarnya rakyat tahu bahwa jenderal tersebut dapat marah dan memobilisasi ketakutan serta teror.



Gambar 3.7. Baliho Soeharto yang dipasang di ruang publik untuk menunjukkan pengawasan

Sumber: buku Ruang Publik, Identitas Pasca-Soeharto

Maka, dengan kata “pembangunan” seolah-olah semua hal yang dilakukan oleh penguasa saat itu adalah dalam rangka pembangunan, sedangkan yang menolak hal tersebut dapat dikatakan menentang pembangunan dan dapat dikenai sanksi.

Hal tersebut dilakukan juga oleh salah satu Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Pada masa kepemimpinannya, Jakarta dinyatakan tertutup bagi pendatang. Bagi penduduk kota yang tidak memahami “rasionalitas perkotaan” dikenai sanksi ditransmigrasikan ke luar kota. Kampung-kampung yang dianggap membawa masalah, menurutnya harus diperbaiki. Mode transportasi yang tidak modern dan menghalangi pergerakan ekonomi yang cepat, harus dihilangkan dari kota Jakarta.

Gubernur Ali Sadikin berkata: Saya membersihkan Lapangan Gambir, Lapangan Merdeka (Monas), yang busuk dan kotor, penuh kerusakan, rumput-rumput liar, kacau karena di sana terdapat pipa-pipa besi yang besar. Bagaimana bisa pemandangan seperti ini bisa ada di depan istana kepresidenan? Siapa yang akan percaya dan berniat menanamkan modalnya di Jakarta bila kondisi ini terlihat di depan balai agung, di depan istana?⁴¹ Visi Bang Ali adalah turunan dari visi sang penguasa, Soeharto, yaitu memberi kota suatu disiplin, mobilitas ekonomi, dan penghormatan nasional.

Demokrasi dan keamanan nasional sering dianggap sebagai dua hal yang tidak sejalan. Disatu sisi, demokrasi adalah sistem kekuasaan yang memberikan warganya kebebasan untuk mengekspresikan keinginan dan pendapatnya melalui lembaga – lembaga politik yang demokratis. Sementara disisi lain demi sebuah keamanan nasional terkadang penguasa atau pemerintah harus mengorbankan hak – hak kebebasan warganya. Dengan demikian proses demokratisasi secara langsung berhadapan dengan upaya pembatasan hak – hak warga masyarakat. Hal inilah yang terjadi pada era orde baru dimana pemerintah yang otoriter telah menekan sendi – sendi demokrasi bangsa Indonesia.

Sedemikian eksesifnya cara – cara pemerintah menciptakan rasa aman bagi negara sehingga masyarakat malah merasakan bahwa terjadi korelasi negatif antara keamanan nasional dengan rasa aman warga masyarakat. Akibatnya negara menjadi ancaman yang menakutkan bagi warga masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah bahwa, hampir di setiap periode kekuasaan di Indonesia, terdapat usaha mewujudkan kuasanya dalam ruang publik di dalam kota, khususnya Jakarta. Belanda. Mewujudkan kuasanya melalui dominasi terhadap ruang kota dengan cara menciptakan design kota yang rasis.

⁴¹ Ali Sadikin, Bang Ali, dikutip oleh Abidin Kusno, RuangPublik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Soeharto, hlm. 53

Penjajah Eropa di tempatkan dalam suatu kawasan yang sama, yang di dalamnya terdapat fasilitas lengkap, sedangkan penduduk asli tinggal di kampung-kampung yang notabene minim fasilitas dan menjadi sarang penyakit. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia

BAB 4 PAGAR dan MONAS

4.1. Pagar

Pagar, atau dalam bahasa Inggris adalah *fence*, merupakan sebuah struktur berdiri untuk membatasi atau mencegah perpindahan (*movement*) melewati sebuah batas. Secara umum, pagar berbeda dari dinding. Dinding, mencegah pergerakan dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari batu bata atau beton, dan menghalangi pandangan kita ke luar batas.⁴² Dalam kamus Oxford, *fence* diartikan sebagai dinding yang terbuat dari kayu atau kawat, dikelilingi atau memisahkan dengan pagar.

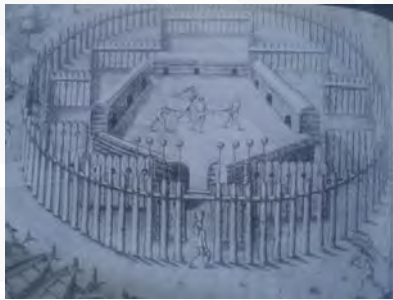
Pagar telah digunakan oleh masyarakat dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Bentuk dan fungsinya pun telah jauh berkembang. Sebagai contohnya adalah, penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika menggunakan pagar untuk membatasi wilayah mereka, untuk melindungi diri dan persediaan makanan yang mereka miliki dari bahaya, terutama dari binatang buas. Pagar menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Pada pertengahan abad 17, penduduk asli Amerika di Canada membuat sebuah pagar dengan bentuk V, untuk menangkap rusa. Bentuk V ini membuat rusa dipaksa untuk menuju satu titik dimana di titik tersebut, telah menunggu penduduk asli Amerika. Mereka lalu menangkap rusa tersebut untuk dikonsumsi.

Pada masa selanjutnya, ketika Amerika mulai didatangi oleh penjajah dari Inggris, pagar juga menjadi bagian yang penting dari sejarah penjajahan. Penjajah, menggunakan pagar untuk membatasi dan menandai wilayah jajahan mereka. Mereka menggunakannya agar penduduk asli tahu, bahwa daerah di dalam pagar adalah

⁴² www.wikipedia.com

daerah kekuasaan penjajah. Selain itu, penjajah juga memfungsikan pagar ini sebagai semacam benteng pertahanan. Namun dalam perkembangannya, pagar ini lebih berfungsi untuk menjaga hak pribadi daripada sebagai perlindungan diri. Di mata penjajah, melakukan pemagaran tertutup terhadap wilayah mereka merupakan cara terbaik untuk merebut kepemilikan wilayah dari penduduk asli.⁴³



Gambar 4.1. Masyarakat asli Amerika yang menggunakan pagar untuk melindungi diri mereka dari binatang buas
Sumber: buku *Between Fences*



Gambar 4.2. Penduduk asli Amerika menggunakan bentuk pagar seperti anak panah untuk menangkap rusa
Sumber: Buku *Between Fences*

Penjajahan merupakan bentuk penguasaan terhadap orang lain melalui sebuah area atau ruang, yang harus dipahami dan dikomunikasikan. Di sini, para penjajah yang berasal dari Eropa mengkomunikasikan penjajahannya dengan membuat pagar yang membatasi ruang mereka terhadap penduduk asli Amerika. Batas yang diciptakan oleh penjajah ini pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk menjaga kekayaan yang mereka miliki dari penduduk pribumi dan bahaya binatang buas, akan

⁴³ Gregory K. Dreicer, *Between Fences*, hlm 2

tetapi menjadi tanda pembeda antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari Eropa, serta antara hak pribadi dan umum.



Gambar 4.3. Masyarakat asli Amerika, menggunakan pagar sebagai benteng, 1635

Sumber: buku *Between Fences*

Perkembangan selanjutnya, pagar lebih difungsikan untuk menjaga kekayaan yang penduduk miliki. Khususnya menjaga binatang yang digunakan untuk beternak, karena pada masa ini penduduk mulai beternak. Menurut Edward Todd (1860), “Dimanapun sebuah peternakan berada, atau apapun jenis produksinya, pagar, pagar, pagar adalah yang hal yang harus dipikirkan pertama, kedua, dan terakhir, dari operasi rutin sebuah peternakan. Di sini, bahan pagar yang digunakanpun mulai berkembang. Semula, pagar-pagar dibuat dengan menggunakan bahan kayu, kemudian berkembang menggunakan batu. Bentuknyapun mulai beragam. Worm fence menjadi semacam national fence di Amerika.

Amerika terus berkembang, begitu pula dengan masyarakat dan tatanan sosialnya. Pada tahun 1896, mereka mulai hidup secara individual dan tidak berkelompok seperti semula. Keluarga inti tinggal dalam satu rumah, yang

membutuhkan *privacy* dan keamanan. Pada masa ini, individualisme dan *privacy* menjadi sangat penting. Untuk menjaga *privacy* setiap keluarga, maka di sekeliling rumahnya, mereka membangun pagar. Pagar telah bertambah fungsinya untuk mendefinisikan mana ruang publik, mana ruang privat.⁴⁴ Pagar ini menjadi pembatas yang menunjukkan transisi ke dalam ruang-ruang tersebut. Selain menunjukkan area publik dan privat, pagar di rumah-rumah Amerika menjadi semacam simbol untuk menunjukkan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh sang pemilik rumah. Hal ini dapat dilihat dari detail dan motif yang dapat ditemukan di pagar tersebut. Pagar telah membentuk sebuah kekuatan yang stabil dalam sebuah area.⁴⁵

Dapat kita simpulkan bahwa pagar, di Amerika penggunaannya digunakan sebagai semacam benteng atau alat untuk melindungi diri dari ancaman bahaya binatang buas, sebagai penanda wilayah terjajah bagi kaum penjajah, sebagai benteng pertahanan dari penduduk asli, sebagai batas yang memisahkan antara ruang publik dan privat, penanda kekayaan pemilik rumah, serta dapat digunakan sebagai identitas.

Di Indonesia, masyarakat Bali, Jawa, dan Dayak juga telah menggunakan pagar sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakatnya. Dalam adat masyarakat Bali, pagar menjadi sebuah hal yang mutlak. Pagar dibangun mengelilingi hunian, serta mengelilingi “umah meten”, yang merupakan bagian inti dari rumah masyarakat Bali. Umah meten terdiri atas ruang-ruang tidur yang digunakan oleh orang tua, dan anak gadisnya. Pagar ini berfungsi untuk melindungi umah meten, yang memerlukan keamanan yang tinggi.

Pada pintu masuk hunian masyarakat Bali, terdapat sebuah dinding pembatas yang dinamakan dengan aling-aling, yang tidak saja berfungsi sebagai penghalang

⁴⁴Gregory K.Dreicer, *Between Fences*, hlm. 3

⁴⁵ Gregory K.Dreicer, *Between Fences*, hlm. 37

pandangan ke arah dalam (untuk memberikan privasi), tetapi juga digunakan sebagai penolak pengaruh-pengaruh jahat/jelek.⁴⁶



Gambar 4.4. Rumah adat dan pagar Bali

Sumber: www.architecturebalipurba.com

Mengamati hunian tradisional Bali, sangat berbeda dengan hunian pada umumnya. Hunian tunggal tradisional Bali terdiri dari beberapa masa yang mengelilingi sebuah ruang terbuka. Gugusan masa tersebut dilingkupi oleh sebuah tembok/dinding keliling. Dinding pagar inilah yang membatasi alam yang tak terhingga menjadi suatu ruang yang oleh Yoshinobu Ashihara disebut sebagai ruang luar.⁴⁷ Jadi, halaman di dalam hunian masyarakat Bali adalah sebuah ruang luar. Konsep pagar keliling dengan masa-masa di dalamnya memperlihatkan adanya kemiripan antara konsep Bali dengan dengan konsep ruang luar di Jepang. Konsep pagar keliling yang tidak terlalu tinggi ini juga sering digunakan dalam usaha untuk “meminjam” unsur alam ke dalam bangunan.

⁴⁶ www.architecturebalipurba.com

⁴⁷ www.architecturebalipurba.com

Dapat disimpulkan bahwa pagar, dalam budaya Bali digunakan sebagai alat untuk melindungi sesuatu yang dianggap sangat penting, yaitu *uma meten*. Selain itu, pagar juga menjadi semacam pemisah yang memisahkan antara ruang dalam dan ruang luar. Ruang dalam yang dimaksud adalah ruang- ruang yang berada di dalam hunian, termasuk ruang terbuka yang berada di dalam hunian. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang luar adalah alam semesta. Pagar membatasi alam semesta dan sang pemilik hunian. Selain itu, pagar dianggap sebagai pelindung dari kekuatan-kekuatan jahat.

4.2 Pemagaran Monas sebagai Studi Kasus

Dalam misi masterplan Monas, Monas akan diproyeksikan menjadi ruang publik dengan skala nasional (*central square* nomor 1 di Indonesia), sekaligus bingkai Tugu Monas, yang merupakan tonggak sejarah perjuangan pembentukan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pemagaran Monas yang dilakukan oleh Soetiyoso, sebagai Gubernur DKI, menjadi kontradiktif dengan misi menjadikan Monas sebagai ruang publik dengan skala nasional. Seperti kita ketahui, di dalam ruang publik seharusnya terdapat kebebasan untuk mengeluarkan spontanitas publik dan kebebasan kolektif, akan tetapi esensi ruang publik menjadi kabur dengan dibangunnya pagar tersebut. Pemagaran terhadap Monas secara sadar maupun tidak sadar mengakibatkan beberapa hal, diantaranya adalah pembatasan akses terhadap pedagang kaki lima, pengunjung, dan aktivitas yang bersifat politis. Oleh karena hal tersebut, peristiwa pemagaran Monas menjadi menarik untuk dianalisis sebab akibatnya.



Gambar 4.5. , 4.6. , 4.7.

Situasi Lapangan Merdeka sebelum pemagaran Monas

4.5. Soekarno menggunakan Taman Monas untuk melakukan orasi.

4.6. , 4.7. Masyarakat dengan bebas mengakses Taman Monas.

Sumber:buku Tugu Monas Laporan Pembangunan

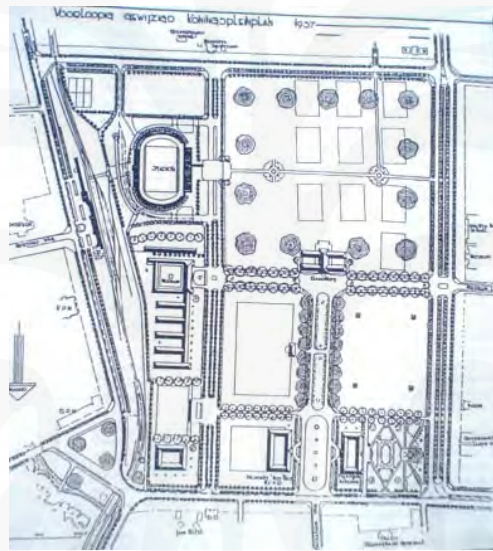
4.3 Monas Sepanjang Sejarah

Menurut sejarah, dahulu, ketika Indonesia masih mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda, lapangan Monas yang luasnya hampir 100 hektare ini, digunakan oleh Daendeles sebagai area latihan militer. Area ini dahulunya adalah sebuah kubangan kerbau. Namun, pada masa selanjutnya, lapangan ini, yang dahulu disebut *koningsplein* digunakan sebagai alun-alun utama. Pemerintahan Belanda memerintahkan seorang arsitek yang bernama Thomas Karsten untuk merancang alun-alun kota ini sebagai pusat administrasi Belanda, dan harus mempunyai *link* kepada daerah Menteng, yang merupakan kota satelit pada masa itu. Di sekitarnya dibangun banyak kantor-kantor utama pemerintahan, perumahan orang-orang Eropa, yaitu perumahan Menteng dan Gondangdia, serta terdapat konsentrasi dari toko-toko Eropa, khususnya di sekitar Pasar Baru, di jalanan yang sekarang kita kenal dengan Jalan Nusantara. Akan tetapi, sebelum proyek ini diselesaikan oleh Karsten,

Universitas Indonesia

Indonesia mengalami penyerangan yang dilakukan oleh Jepang, yang dilanjutkan dengan perang merebut kemerdekaan. Pembangunannya kemudian dilanjutkan pada masa pasca kemerdekaan.

Koeningsplan merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan, dan merupakan pusat kota Jakarta. Gedung-gedung pemerintahan berada di lingkaran koeningsplan. Sampai sekarangpun, Taman Monas tetap menjadi pusat aktivitas kota Jakarta.



Gambar 4.8. Rencana induk Koningsplein tahun 1937 yang dikembangkan oleh Thomas Karsten

Sumber: buku Tugu Nasional Laporan Pembangunan

Pasca kemerdekaan, saat Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno memutuskan untuk merubah Jakarta. Soekarno ingin memperlihatkan Jakarta dengan versinya sendiri. Soekarno melakukan pelupaan terhadap Hindia Belanda dan memori penjajahannya. Soekarno ingin agar Jakarta seperti halnya kota-kota lain di dunia, harus mempunyai sebuah image sebagai sebuah pusat, yang mempunyai kebebasan dan sebuah *signs* yang dapat dijadikan penghubung dengan kota-kota lain di dunia. Oleh karena itu, dicetuskanlah sebuah

proyek untuk membangun sebuah monument di pusat kota Jakarta, yang pada akhirnya akan menjadi titik aksis dari Jakarta dan Indonesia.

Monumen Nasional yang dikenal dengan nama Tugu Monas, terletak di jalan Taman Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Monas mulai dibangun tahun 1959, dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961, dan benar-benar selesai dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975, di era pemerintahan Soeharto.

Bangunan ini bergaya Jawa arsitektur kuno, yang merupakan perpaduan antara simbol Lingga dan Yoni, yang merupakan lambang kesuburan. Bangunan ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 bertepatan dengan peletakan batu pertama oleh presiden Soekarno. Rancangan pertama bangunan ini didesign oleh Ir. Soedarsono, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh F. Silaban, dan bahkan Presiden Soekarno sendiri ikut terlibat dalam perancangan arsitekturnya. Monumen nasional ini memiliki makna sebagai lambing kepribadian, kebesaran, dan keagungan nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia. Pada puncak bangunan ini mengambil bentuk lidah api yang dilapisi emas murni sebagai lambing api perjuangan bangsa Indonesia yang takkan pernah padam dalam melintas waktu menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai suatu ciri kepribadian bangsa. Bangunan ini syarat dengan simbol-simbol keramat yang dituangkan dalam wujudnya. Dimulai dari ukurannya yang digunakan yaitu 8X8 m untuk ukuran bagian bawah tugu, 5X5 m untuk bagian atas, dan tinggi badan tugu yang mencapai 115m, hal ini disesuaikan dengan angka keramat 17-8-45 hari kemerdekaan bangsa Indonesia.

Keberadaan Monumen ini dimaksudkan sebagai titik pusat Jakarta, titik ukur jarak dengan kota lainnya. Di sekeliling tugu terdapat taman, dua buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur, Minggu atau libur sekolah banyak masyarakat yang berkunjung ke sini.

4.4 Kebijakan Soetiyoso terhadap Ruang Publik di Jakarta

Pemagaran Monas terjadi pada masa Jakarta dipimpin oleh Soetiyoso. Sebagai warisan rezim Soeharto, Soetiyoso mewarisi berbagai teknik kepemimpinan yang dapat diasosiasikan dengan Orde Baru. Di Jakarta, dia melanjutkan kebijakan rezim sebelumnya : menggusur kampung, melarang becak dan ojek, menangkap dan mengusir pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, pemulung, dan pelacur. Ia juga melanjutkan privatisasi ruang kota dan pada saat yang sama mendengungkan kesadaran penduduk Jakarta melalui proyek renovasi monumen-monumen nasional.⁴⁸

Pada awal Soetiyoso menjabat sebagai Gubernur, Indonesia sedang mengalami sebuah krisis multidimensional. Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada saat itu merupakan kondisi yang sangat buruk. Jakarta khususnya, sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan mengalami suatu gejolak yang berkaitan dengan kelanjutan berbagai macam krisis. Mulai krisis ekonomi, krisis pembangunan, krisis kekuasaan, sampai krisis kehidupan. Sebagai puncaknya, terjadi kerusuhan Mei yang melengserkan Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soeharto. Kerusuhan yang menimbulkan kerusakan fisik dan moral ini telah menimbulkan konsekuensi yang luar biasa, salah satunya adalah pandangan penduduk terhadap kota dan negara.⁴⁹

Akibat dari krisis ini dapat dilihat langsung di dalam ruang kota. Jakarta dipenuhi oleh sampah, pagar tinggi, gardu, palang pembatas, jalan yang ditutup seenaknya, kaki lima, warung, penganggur, demonstrasi, dan banyak orang yang tidak takut polisi.

Hal ini disebabkan karena kota Jakarta dibentuk dari masa ke masa melalui kebijakan negara sebagai pusat dari segalanya : pertukaran kapital, kekuasaan politik

⁴⁸ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif Jakarta Pasca-Soeharto, hlm. 103

⁴⁹ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif Jakarta Pasca-Soeharto, hlm. 106

dan aset kebudayaan. Jadi, penguasa seolah-olah mempunyai hak penuh untuk mengubah ruang fisik Jakarta dengan alasan bahwa negara membutuhkan suatu pusat untuk menyatukan dan memamerkan kemajuan pembangunan bangsa. Wacana ini dimulai pada masa Orde Baru yang disebut dengan “urbanisme nasionalis” yang menyandingkan pembangunan berdasarkan kekuatan liberalisasi ekonomi ala barat (dari IMF) dan wacana kekuasaan nasionalisme oligarki konservatif. Ketika Orde Baru akhirnya runtuh, maka pusat yang dibuat oleh penguasa ini akhirnya mengalami kelonggaran. Pada akhirnya, kelonggaran di pusat ini mengakhiri kepercayaan warga kota pada urbanisme nasionalis, yang selama ini digunakan oleh para elit untuk mengubah wajah kota.

Kelonggaran di pusat mendorong warga Jakarta untuk bertindak sendiri menciptakan suatu kondisi yang membuat setiap orang menjaga ruang masing-masing. Penduduk Jakarta dari berbagai kalangan mulai berani mengeluarkan pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan rakyat mengetahui bahwa protes-protes mereka tidak akan mudah dipadamkan. Protes-protes publik telah ditoleransi sehingga menimbulkan kesan bahwa “Jakarta masa kini tidak dapat dipisahkan dari unjuk rasa di ruang publik”. Pada era reformasi ini semua jenis pergerakan telah muncul, sehingga arena kehidupan sosial politik kota menjadi lebih semarak, dan rakyat pada saat itu bebas mengeluarkan pendapat, termasuk menolak ruang-ruang yang dibuat oleh kota.⁵⁰

⁵⁰ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca Soeharto, hlm.



Gambar 4.9. Salah satu aksi mahasiswa yang dilakukan di depan gedung DPR/MPR

Sumber: dokumen pribadi

Pemerintah Jakarta dalam kondisi kelonggaran pusat ini, di bawah Soetiyoso membentuk afiliasi dengan kelompok-kelompok sipil dan para preman untuk menunjukkan kekuasaan. Soetiyoso, sebagai gubernur pada masa itu bekerjasama dengan FPI, yang juga aktif melobi anggota DPRD Jakarta untuk menutup tempat-tempat pelacuran di Jakarta.

Sebagai gubernur, Soetiyoso adalah tokoh yang menarik. Sepanjang dua periode menjadi gubernur, ia sering mengundang kontroversi ketika menggulirkan kebijakan. Beberapa diantaranya adalah proyek angkutan umum busway, dan proyek pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat.

4.5 Latar Belakang Pemagaran Monas

Perubahan perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh kelonggaran di pusat pasca jatuhnya Orde Baru, telah mengakibatkan beberapa hal yang berkaitan dengan ruang kota. Warga Jakarta mulai tak segan-segan untuk berteriak dan mengungkapkan rasa curiga, skeptis, dan kemarahan atas proyek-proyek negara.

Selain itu, keadaan sosial ekonomi yang memburuk diakibatkan oleh krisis, menyebabkan banyak tenaga profesional yang terkena PHK, dan akhirnya beralih profesi atau mendirikan bisnis sendiri. Mereka akhirnya membuka bisnis keluarga, tempat bimbingan belajar, toko, restoran, dan tempat perjudian. Sedangkan rakyat

miskin yang kehilangan pekerjaan di industri-industri manufaktur terpaksa menggunakan ruang publik dalam kota untuk mempertahankan hidup. Mereka beralih profesi menjadi pedagang-pedagang kaki lima, pengemis, dan preman.



Gambar: 4.10. Menjemur sarung di lapangan Monas di awal pasca-Soeharto

Sumber: buku Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca Soeharto

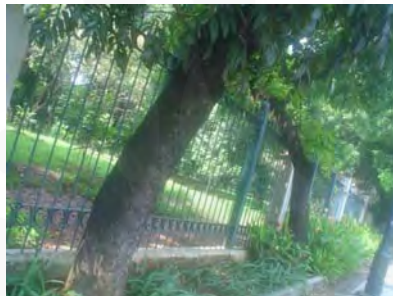
Pemerintah kota merasa tidak mampu untuk membatasi aktivitas mereka, apalagi mengusir mereka, karena petugas kota khawatir terhadap kerusuhan. Akibatnya, pemerintah kotapun ikut mengubah ruang fisik kota: pagar-pegar dibangun di taman publik dan kawat berduri diletakkan di jalan setapak untuk menghalangi pedagang kaki lima menggunakannya.

Untuk menghadapi perubahan perilaku masyarakat di Jakarta pasca 1998, Gubernur Sutiyoso mencanangkan beberapa proyek yang berunsur “urbanisme nasionalis”. Sutiyoso menunjukkan minatnya pada monument-monumen nasional, serta merencanakan penempatan patung-patung pahlawan nasional di setiap perempatan jalan yang memakai nama pahlawan tersebut. Tujuan proyek ini, menurut

Universitas Indonesia

Soetiyoso, adalah untuk membuat publik menghormati perjuangan para pemimpin nasional Indonesia. Soetiyoso juga memerintahkan memagari taman Monas yang merupakan ruang ,sekaligus taman publik. Taman terluas di Jakarta telah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat orang mencuci dan menjemur pakaian, sementara banyak tanaman telah diobrak-abrik. Soetiyoso mengibaratkan kota Jakarta seperti hutan. Isinya binatang buas. Itu berarti gubernurnya harus lebih buas dari binatang-binatang itu. .

Taman Monas sebelumnya sering dijadikan arena demonstrasi untuk melawan Gubernur maupun Presiden Indonesia, yang mempunyai istana tepat di seberangnya. Soetiyoso dikabarkan marah melihat Monas, “simbol Indonesia sekarang hancur”.⁵¹ Untuk mengembalikan citra Monas, Soetiyoso memerintahkan perbaikan lingkungan di taman, seperti penapakan jalan, penanaman berbagai pohon, penempatan kijang-kijang, dan pemagaran seluruh lingkungan Monas untuk menciptakan “keamanan dan kenyamanan para pengunjung”.



Gambar 4.11. Pagar yang mengelilingi Taman Monas

Sumber:dokumen pribadi

⁵¹ Abidin Kusno, Ruang Publik, Identitas, dan Memori Kolektif :Jakarta Pasca Soeharto



Gambar 4.12. Pagar di sekeliling Monas

Sumber:dokumen pribadi



Gambar 4.13. Pintu Monas yang direncanakan akan didirikan

monument peringatan

Sumber:dokumen pribadi

Proyek ini telah menggusur ribuan pedagang kaki lima, dan hanya menyisakan 647 pedagang yang masih beruntung. Untuk memperkuat posisi Taman Monas, gubernur juga merencanakan mendirikan monumen peringatan pada keempat sudut Tugu Monas ,yang menyimbolkan setiap masa dalam sejarah negara: masa kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, masa pancaroba Indonesia di zaman kolonial, masa perjuangan kemerdekaan, dan era Pembangunan.



Gambar 4.14. Pedagang kaki lima yang masih beruntung diberi kesempatan berdagang di Taman Monas pasca pemagaran

Sumber:dokumen pribadi

Universitas Indonesia

Warga Jakarta yang merasa terganggu, menerima perintah Soetiyoso dengan perlawanan, dengan melakukan aksi pagar manusia mengelilingi Taman Monas. Untuk menjaga keamanan di Monas, Soetiyoso menyebar lebih dari 300 Satuan Polisi Pramong Praja, atau yang sering disebut dengan Satpol PP, dan beberapa regu polisi dari Polsek Metro Gambir



Gambar 4.15. Patroli keliling

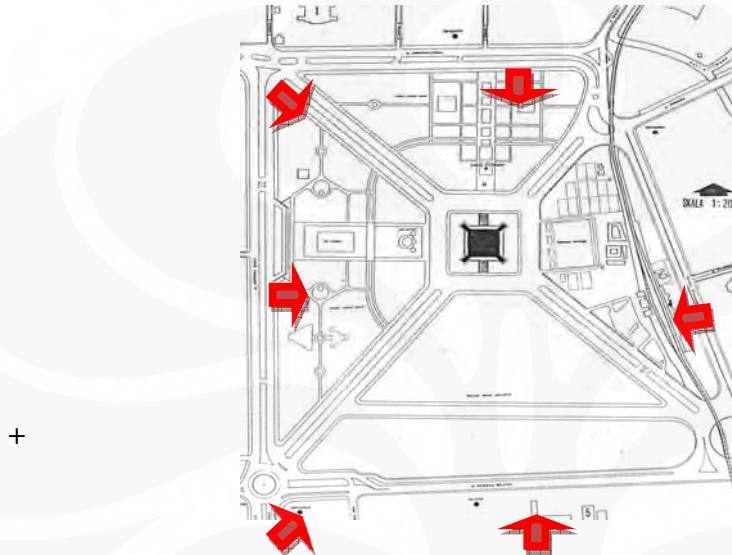
Sumber: dokumen pribadi



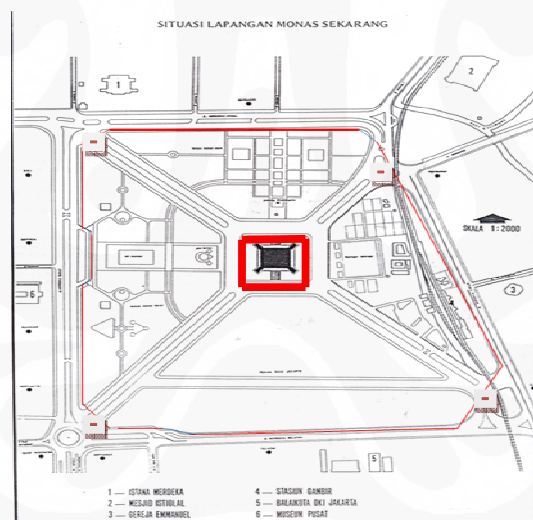
Gambar 4.16. Aksi menyuarakan politik di Monas

Sumber: www.suaramerdeka.com/03/03/01/demo.jpg

4.6 Master Plan Monas

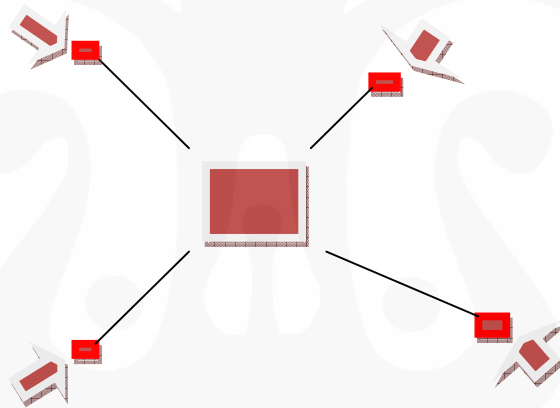


Gambar 4.17. Monas sebelum dipagar, memiliki akses dari berbagai macam arah



Gambar 4.18. Taman Monas yang telah dipagar.

Gambar tersebut menggambarkan bahwa akses Monas pasca pemagaran sangat dibatasi. Hanya 4 pintu saja yang dibuka. Itupun tidak semua orang dapat memasukinya. Pagar besar hanya dibuka bagi pegawai di dalam Monas sendiri, sedangkan pintu kecil boleh dimasuki oleh siapa saja, kecuali bagi pedagang kaki lima, dan orang-orang yang mempunyai tujuan melakukan aksi politik dan demonstrasi. Sebagai ruang publik yang di dalamnya terdapat ruang demokrasi yang mampu mewadahi spontanitas publik, akses yang dipagari dan dibatasi membuat aktivitas yang berada di dalamnya ikut terbatas, tidak diperbolehkan memasuki area Taman Monas, kecuali bagi yang berkepentingan. Aktivitas yang berhubungan dengan politik dilarang memasuki kawasan ini.



Gambar 4.19. Pola Akses ke dalam Monas

Empat pintu ini dijaga oleh Polisi Pramong Praja. Polisi Pramong Praja yang disebar ke seluruh Monas menjadi salah satu tanda, bahwa kuasa ada di Taman Monas Jakarta.



Gambar 4.20. Patroli keamanan Monas

Penempatan *sign* di depan empat pintu tersebut menunjukkan usaha adanya pengingatan terhadap kuasa masa lalu

4.7 Pagar dan Monas



Gambar 4.21. Pagar Monas

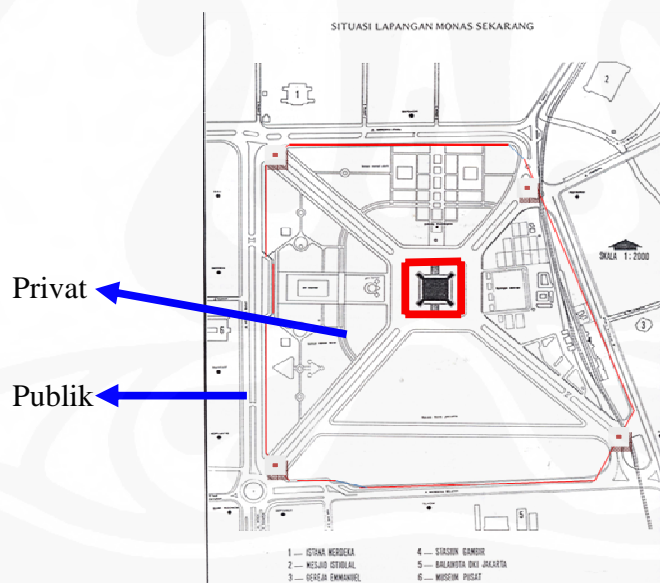
Taman Monas, yang dulunya bernama Koeningsplan pada tahun 1945 diputuskan oleh K.D.K.I Jakarta Raya untuk dijadikan sebagai taman kota, yang dapat dipakai untuk berekreasi dan sebagai paru-paru kota Jakarta, serta sebagai

Universitas Indonesia

penunjang menambah kemegahan berdirinya Tugu Monas. Sampai akhir masa kekuasaan Soeharto yang otoriterpun Taman Monas tetap berfungsi seperti semula.

Melalui SK Gubernur No.36/2002, Gubernur Soetiyoso melakukan pemagaran terhadap ruang publik. Pemagaran ini bertujuan untuk mencegah pedagang kaki lima dan preman memasuki taman.

Pagar, yang didefinisikan sebagai sebuah struktur berdiri untuk membatasi atau mencegah perpindahan (*movement*) melewati sebuah batas. Dari definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pagar, digunakan dengan sengaja untuk membatasi sesuatu. Sesuatu yang dimaksud tersebut adalah dapat berupa sebuah aktivitas atau sebuah perpindahan. Penggunaan pagar pada budaya-budaya yang telah disebutkan di atas, yang paling utama adalah digunakan sebagai pemisah antara ruang publik dan ruang privat. Untuk kondisi Monas, Taman Monas yang dikatakan sebagai ruang publik terbesar di Indonesia, kondisinya menjadi privat, jika ditinjau dari fungsi pagar tersebut.



Gambar 4.22. Area publik-privat Taman Monas, ditinjau dari budaya pagar

Sumber: buku Tugu Monas Laporan Pembangunan

Pemagaran adalah salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap penggunaan ruang publik. Dengan pemagaran ini, akses masuk ke dalam Monas menjadi sangat terbatas. Hanya disediakan 4 pintu masuk besar, yang hanya dibuka bagi petugas patroli, dan pegawai Monas. Selain itu, pemerintah menggunakan alasan kepentingan bersama, akan tetapi mengabaikan kepentingan yang lain, salah satunya pedagang kaki lima.



Gambar 4.23. Pintu masuk Monas
Sumber:dokumen pribadi

Dimensi publicity/privacy, segregation acces, nature history, stability/change serta dominant docile dalam ruang publik Taman Monas, menandakan adanya kuasa dalam Taman Monas.

BAB 5

KESIMPULAN

Dari studi kasus yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemagaran Monas merupakan salah satu representasi kuasa dalam ruang publik. Hal ini terlihat dari beberapa dimensi kuasa yang dipakai untuk membatasi akses ke dalam Lapangan Monas. Pembatasan tersebut dilakukan kepada pedagang kaki lima, orang-orang yang akan melakukan aktivitas politik, dan orang-orang yang akan melakukan demonstrasi.

Pembatasan ini dilakukan dengan berbagai macam dimensi, yaitu: *segregation/access*, yaitu dengan cara hanya menyediakan 4 akses masuk terhadap Taman Monas. Selain itu, akses tersebut juga hanya boleh dimasuki oleh para pengunjung Monas saja. Pengunjung dengan maksud yang lain, tidak diperbolehkan memasuki kawasan Monas, termasuk pedagang kaki lima dan orang-orang yang bermaksud melakukan aksi politik (contohnya: demonstrasi). Untuk alasan keamanan tersebut, maka disebar polisi Pramong Praja, yang jumlahnya melebihi 300 orang.

Selanjutnya, pemerintah berencana memasang sign-sign sejarah masa lalu di depan pintu Monas. Hal ini akan mengingatkan pengunjung terhadap kekuatan di masa lampau. Kuasa yang diwujudkan dalam arsitektur, serta diperkuat dengan legitimasi, yaitu dengan SK Gubernur No.36/tahun 2002, serta ditempatkannya patroli polisi pramong praja di seluruh penjuru Monas, sedikit banyak telah menunjukkan bahwa di Taman Monas Jakarta terdapat kuasa.

Kuasa ini membatasi aktivitas dan memengaruhi perilaku orang-orang yang berada di dalamnya

DAFTAR REFERENSI

- Dreicer, Gregory K. 1997. *Between Fences*. Princeton Architectural Press, Washington, D.C.
- Potter, David. 1997. *Democratization*. Polity Press, Malden.
- Dovey, Kim. 1999. *Framing Places Mediating Power in Built Form*. Routledge, New York.
- Fakih, Farabi. 2005. *Membayangkan Ibu Kota di Bawah Soekarno*. Ombak, Yogyakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary
- Kusno, Abidin. 2009. *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif : Jakarta Pasca Soeharto*. Ombak, Yogyakarta
- Kusno, Abidin. *Behind The Postcolonial*. Routledge, Nw York
- Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press
- Pelaksana Pembina Tugu Nasional. 1978. *Laporan Pembangunan Tugu Nasional*. Jayakarta Agung Offset. Jakarta
- Nugroho, Garin. 2005. *Ruang Publik Tanpa Ruang Publik*. Fire Press, Jakarta.
- Sinaga, Reynhard Maruli Tua Sinaga. 2006. *Power Architecture*. Fakultas Teknik UI. Depok
- www.architecturebalipurba.com
- www.architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-romawi.html
- www.gabesguide.com/prison.jpg
- www.geocities.com/mikvs_britman/01/Agora.html
- www.pix.com./landscapes/europe/england.jpg
- www.pix.com./landscapes/europe/england.jpg
- www.policewatch.com
- www.travel.webshot.com
- www.wikipedia.co.id